

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

21. Penandaan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi
a. Sub-kegiatan

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0037	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.01	0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	1.01	0055	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.01	0076	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terseleenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.01	0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.01	0080	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak yang Direhabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Direhabilitasi	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0029	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0048	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0068	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terseleenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0077	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.02	0079	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0012	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	1.03	0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0036	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0064	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	1.03	0083	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.03	0061	Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus yang Tersedia	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.03	0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	Terbangunnya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas	Terbangunnya Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terbangunnya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terbangunnya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas	Terpeliharanya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/ Akademi Yang Dipelihara	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terpeliharanya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi Yang Dipelihara	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terpeliharanya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan Yang Dipelihara	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Terehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang direhabilitasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Terehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Terehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang direhabilitasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas	Tersedianya Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang Tersedia	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Terehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	3.04	0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Akademi Komunitas	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas yang Tersedia	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.04	0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0025	Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas	Tersedianya Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas Diterima oleh Mahasiswa/i	Jumlah Mahasiswa/i Akademi Komunitas yang Menerima Biaya Personil Mahasiswa/i	Peserta didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.04	0027	Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i	Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas	Perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Tersedianya bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Jumlah bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas yang disediakan	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	3.04	0038	Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	3.04	0039	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	3.04	0040	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.04	0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.04	0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	3.05	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	3.05	0003	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.05	0004	Penyediaan Biaya Afiriasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afiriasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afiriasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.06	0001	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Jumlah Siswa PAUD Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.06	0002	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.06	0003	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.06	0004	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.06	0005	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.06	0006	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.06	0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.06	0008	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Tersedianya Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Jumlah Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Mahasiswa	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.07	0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	3.07	0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.03	0061	Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus yang Tersedia	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.03	0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	Terbangunnya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas	Terbangunnya Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	4.04	0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terbangunnya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terbangunnya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas	Terpeliharanya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/ Akademi Yang Dipelihara	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terpeliharanya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi Yang Dipelihara	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terpeliharanya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan Yang Dipelihara	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Terehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang direhabilitasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Terehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Ruang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Terehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang direhabilitasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas	Tersedianya Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang Tersedia	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Terehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Akademi Komunitas	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas yang Tersedia	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.04	0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0025	Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas	Tersedianya Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas Diterima oleh Mahasiswa/i	Jumlah Mahasiswa/i Akademi Komunitas yang Menerima Biaya Personil Mahasiswa/i	Peserta didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.04	0027	Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i	Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas	Perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Tersedianya bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Jumlah bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas yang disediakan	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	4.04	0038	Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	4.04	0039	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	02	4.04	0040	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.04	0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.04	0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	02	4.05	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.05	0003	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.05	0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.06	0001	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Jumlah Siswa PAUD Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.06	0002	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.06	0003	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.06	0004	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.06	0005	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.06	0006	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	4.06	0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	02	4.06	0008	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Tersedianya Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Jumlah Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Mahasiswa	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	04.07	0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	02	04.07	0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	03	1.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Buku	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	05	1.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	05	1.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	05	1.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	05	1.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	05	1.02	0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	07	7.01	0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	07	7.01	0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	07	7.01	0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Peserta Didik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	07	7.01	0005	Pembinaan Manajemen Dayah	Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	01	07	7.01	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	01	07	7.01	0015	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	08	7.02	0001	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Terkelolanya TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	08	7.02	0002	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Terkelolanya Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	01	08	7.02	0003	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	08	7.02	0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	01	08	7.04	0002	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Terbangunnya Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	1.02	0031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.01	0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas	Tersedianya Dukungan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Tersedia	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	02	02	3.01	0042	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	Terseleenggaranya pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	Kabupaten/Kota	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	3.02	0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/Fasyankes	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	3.02	0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Terlaksananya Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Jumlah dokumen hasil penguatan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	3.02	0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	3.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	02	02	3.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	3.02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	3.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	3.02	0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	3.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	3.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	3.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	3.02	0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	3.02	0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	02	02	3.02	0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak Menular Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	3.02	0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.01	0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	02	4.02	0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/Fasyankes	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Terlaksananya Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Jumlah dokumen hasil penguatan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	02	02	4.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	4.02	0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	4.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	4.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	4.02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	4.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	4.02	0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	4.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	4.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	02	02	4.02	0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	02	4.02	0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak Menular Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	02	4.02	0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	03	3.02	0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	03	3.02	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	03	3.02	0006	Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas	Tersedianya Beasiswa Ikatan Dinas	Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	03	3.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Terlaksana Jaminan Kesehatan kepada OAP yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	03	3.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	03	3.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	03	3.08	0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	Terlaksananya pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	03	4.02	0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	03	4.02	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	03	4.02	0006	Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas	Tersedianya Beasiswa Ikatan Dinas	Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	02	03	4.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Terlaksana Jaminan Kesehatan kepada OAP yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	02	03	4.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	03	4.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	05	3.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	02	05	4.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	02	1.01	0005	Pembangunan Bendungan	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai	Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0015	Pembangunan Bangunan Sabo	Terbangunnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0031	Rehabilitasi Check Dam	Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0048	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendungan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0071	Rehabilitasi Bendungan	Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	Bendungan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0074	Revitalisasi Danau	Terlaksananya Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	Danau	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	02	1.01	0080	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0081	Peningkatan Kanal Banjir	Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0084	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0085	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0091	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0094	Peningkatan Tanggul Sungai	Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0095	Rehabilitasi Unit Air Baku	Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0098	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0102	Pembangunan Check Dam	Terbangunnya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	02	1.01	0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0110	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0111	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0123	Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0124	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0125	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Beroperasi dan terpeliharanya unit air baku	Jumlah unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	UNIT	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	02	1.01	0126	Pemeliharaan bangunan sabo	Terpeliharanya bangunan sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dipelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0128	Revitalisasi Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya	Terevitalisasinya Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya	Jumlah situ dan tampungan air alami lainnya yang direvitalisasi	UNIT	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0129	Rehabilitasi bangunan pengamanan pantai	Terehabilitasinya bangunan pengamanan pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang direhabilitasi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0130	Pembangunan Embung	Terbangunnya Embung untuk fungsi konservasi dan penyediaan air baku	Jumlah Embung yang dibangun	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0131	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0132	Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya sungai	Panjang sungai yang dipeliharra	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0133	Pemeliharaan danau	Terpeliharanya danau	Jumlah danau yang dipelihara	Danau	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0134	Rehabilitasi Embung	Terehabilitasinya Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.01	0135	Pemeliharaan Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya	Terpeliharanya situ dan tampungan air alami lainnya	Jumlah situ dan tampungan air alami lainnya yang dipelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.01	0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Beroperasi dan terpeliharanya embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	02	1.02	0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.02	0040	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	UNIT	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0041	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	UNIT	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0042	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	UNIT	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0043	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan irigasi yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan irigasi	Kegiatan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	02	1.02	0044	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	UNIT	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
1	03	02	1.02	0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
1	03	02	1.02	0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Liter/Detik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	03	1.01	0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Teroptimisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	03	1.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	03	1.01	0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	04	1.01	0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA	Meningkatnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan	Ton/hari	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	04	1.01	0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA	Teroptimisasinya TPA/TPST/SPA	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kabupaten/Kota	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	04	1.01	0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Ton/hari	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
1	03	04	1.01	0015	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	04	1.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Tersedianya sarana pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	04	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Terbinanya dan Terawasinya Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	05	1.01	0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang ditingkatkan	M ³ /Hari	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	05	1.01	0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Teroptimisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	M ³ /Hari	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	kabupaten/kota	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	05	1.01	0019	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sambungan Rumah (SR)	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	03	05	1.01	0020	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M ³ /Hari	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	05	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	05	1.01	0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten/Kota	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	05	1.01	0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan/atau Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
1	03	06	1.01	0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	06	1.01	0009	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	06	1.01	0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	07	1.01	0020	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi yang Disediakan	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0022	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	03	07	1.01	0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Liter/Detik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Liter/Detik	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0027	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	07	1.01	0028	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	SR	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	03	07	1.01	0038	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	M ³ /Hari	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0040	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0041	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	M ³ /Hari	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0043	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0044	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimisasinya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0045	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	M ³ /Hari	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	07	1.01	0046	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang terbangun	M ³ /Hari	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	07	3.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	03	07	3.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	03	07	3.02	0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Tersusunnya kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Jumlah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi Yang Ditetapkan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	07	3.02	0007	Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Tersusunnya pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Tersedianya dokumen pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	07	4.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	03	07	4.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	03	07	4.02	0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Tersusunnya kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Jumlah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi Yang Ditetapkan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	07	4.02	0007	Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Tersusunnya pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Jumlah dokumen pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhun Yang Ditetapkan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	09	1.01	0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	09	1.01	0014	Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen legal sebagai acuan perencanaan detil dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen legal yang disahkan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	09	1.01	0017	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	09	1.01	0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	kabupaten/kota	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	09	1.01	0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0046	Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0047	Pemeliharaan Berkala Jembatan	&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Meter	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0048	Pembangunan Underpass	Terlaksananya Pembangunan Underpass	Panjang Underpass yang Dibangun	Meter	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0049	Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0050	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terlaksananya Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang Terowongan/ Tunnel yang Dibangun	Meter	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0052	Rehabilitasi Jembatan	&Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	10	1.01	0054	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0055	Pembangunan Flyover	Terlaksananya Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun	Meter	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	03	10	1.01	0058	Pembangunan Jalan	&Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	03	10	1.01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
1	03	11	1.01	0020	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Terfasilitasi pengembangan kompetensi Keahlian Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
1	03	11	3.01	0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bagi OAP yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik Konstruksi	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
1	04	02	1.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	04	02	1.01	0012	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah provinsi	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah provinsi	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	04	02	1.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	04	02	2.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	04	02	1.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	02	1.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	04	02	1.03	0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	04	02	1.03	0009	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	04	02	1.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	04	02	1.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	02	1.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	02	1.03	0013	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	02	1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	04	02	1.04	0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	04	02	1.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	04	02	1.04	0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	04	03	1.01	0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	04	03	1.01	0013	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	03	1.01	0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	Kelompok Masyarakat	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
1	04	03	1.01	0015	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	04	03	1.01	0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	03	1.01	0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	03	1.01	0020	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	04	03	1.01	0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	04	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	04	03	1.02	0008	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Hektar	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	04	03	1.02	0009	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rumah Tangga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	03	1.02	0010	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali	Hektar	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	04	03	1.02	0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	04	03	1.02	0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Hektar	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	05	02	1.01	0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	05	03	1.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.02	0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kedaruratan	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.02	0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.03	0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.03	0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.03	0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.04	0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.04	0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.04	0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.04	0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	03	1.04	0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana yang terpilah dengan memprioritaskan GEDSI	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dan dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Dokumen		
1	05	03	1.04	0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	kabupaten/kota	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	03	1.04	0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Terlaksananya Koordinasi atau kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	04	1.01	0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	05	04	1.01	0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	05	04	1.01	0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	05	04	1.01	0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	05	04	1.01	0039	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	02	1.02	0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Tersedianya Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	02	1.02	0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	02	1.02	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/ Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	02	1.02	0012	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Layanan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	02	1.02	0013	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Tersedianya Usulan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	02	1.02	0014	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
1	06	02	1.02	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Usaha	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	02	1.02	0016	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Puskesmas sebagai Layanan Sosial Satu Pintu dan Hub Program Graduasi	Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	02	3.02	0005	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Provinsi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	Keluarga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
1	06	02	3.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan lokasi dan bentuk pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Menetapkan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Ditetapkan	Lokasi	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	02	3.04	0001	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT	Meningkatnya Fasilitasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Jumlah yang Terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	02	4.02	0005	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Provinsi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	Keluarga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	02	4.04	0001	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT	Meningkatnya Fasilitasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Jumlah yang Terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	03	1.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	06	03	3.06	0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	06	03	4.06	0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	Kabupaten/Kota	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	06	04	1.01	0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	04	1.01	0019	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
1	06	04	1.01	0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0019	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan bagi Anak Terlantar Kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.02	0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.03	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	06	04	1.03	0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
1	06	04	1.04	0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.04	0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	04	1.04	0017	Pemulasaraan	Terlaksananya pemulasaraan bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	04	1.05	0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	06	04	1.05	0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Terlaksananya Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	06	04	1.05	0018	Pemulasaraan	Terlaksananya pemulasaraan bagi penyandang disabilitas kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	1.05	0019	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	04	3.06	0001	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	04	3.06	0002	Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Teredianya Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	04	3.07	0001	Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	04	3.08	0001	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Jumlah Lembaga yang dikelola dan dikoordinasikan dalam Pemberian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	04	3.09	0001	Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.	Jumlah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	Kab/Kota	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	04	4.06	0001	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapori di daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapori di daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapori di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	04	4.06	0002	Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Terdianya Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
1	06	04	4.07	0001	Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	05	1.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	05	1.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	05	1.02	0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Terlaksananya pengembangan potensi bagi pendamping program bantuan sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	05	1.02	0010	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	05	1.02	0011	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
1	06	05	1.02	0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	05	3.03	0001	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Kebijakan program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	05	3.04	0001	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	05	3.05	0001	Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Tersusunnya Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Jumlah Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	05	3.06	0001	Penyusunan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tersusunnya Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	05	4.03	0001	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Kebijakan program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	05	4.04	0001	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	05	4.05	0001	Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Tersusunnya Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Jumlah Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	05	4.06	0001	Penyusunan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	Tersusunnya Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	06	1.01	0011	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	06	1.01	0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	06	1.01	0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	06	06	1.01	0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
1	06	06	1.01	0017	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keluarga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
1	06	06	1.01	0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	06	06	1.01	0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	06	1.01	0020	Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	06	1.01	0021	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
1	06	06	1.01	0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
1	06	06	1.01	0023	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	07	03	1.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kesepakatan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	07	03	3.03	0004	Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Tersedianya Insentif Berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Jumlah Insentif Berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP Yang Disediakan	LPK	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	07	03	4.03	0004	Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Tersedianya Insentif Berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Jumlah Insentif Berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP Yang Disediakan	LPK	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	07	04	1.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	1.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	1.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	1.04	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	07	04	1.04	0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	1.04	0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	3.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	3.01	0007	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melalui Kegiatan Kewirausahaan	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	04	3.01	0008	Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	08	02	1,01	0005	Penyusunan Kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	08	02	1,01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	08	02	1,01	0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	08	02	2.02	0005	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	02	1,02	0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	02	1,03	0009	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	08	02	1,03	0010	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	08	03	1,01	0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	08	03	1,01	0006	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	03	1,01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	03	1,02	0003	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	03	1,02	0004	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	03	1,02	0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	03	1,02	0006	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	03	1,02	0007	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	03	1,02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	08	03	1.02	0009	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	03	1,02	0010	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	03	1.03	0006	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	08	03	1,03	0008	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	04	1,01	0005	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	08	04	1.01	0006	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kebijakan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	08	04	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	08	04	1.02	0005	Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	08	04	1,02	0008	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	08	04	1,03	0002	Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	08	04	1,03	0003	Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	08	04	1,03	0004	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	08	04	1,03	0005	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	08	04	1,03	0006	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	08	05	1,01	0003	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	08	05	1,01	0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	05	1,01	0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	06	1,01	0004	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	Kebijakan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	06	1,01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	08	06	1.02	0010	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	06	1.02	0012	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	08	07	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kegiatan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	08	07	1.01	0008	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	07	1.02	0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	07	1.02	0009	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	07	1.02	0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	07	1.02	0011	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	07	1.02	0012	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	08	07	1,02	0013	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	07	1,02	0014	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	07	1,02	0015	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	08	07	1,03	0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	08	07	1,03	0010	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Lembaga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	09	02	1,01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	09	02	1,01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	09	02	1,01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	09	03	1,01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	09	03	1,01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	09	03	1,01	0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	09	03	1.01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	09	03	1.02	0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	09	03	1.02	0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	09	04	1.02	0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	10	03	1.01	0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	10	03	1.01	0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	10	03	1.01	0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	03	3.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	03	4.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	1.01	0002	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Ditetapkannya Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	3.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	3.04	0001	Penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Tersusunnya Kebijakan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	3.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	3.05	0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	3.06	0001	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Ditetapkan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	3.07	0001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	10	07	3.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	3.08	0001	Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Terlaksananya Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Laporan Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	3.10	0002	Pemanfaatan tanah adat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	3.11	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Data tanah adat/ulayat yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	4.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	4.04	0001	Penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Tersusunnya Kebijakan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	4.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	4.05	0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	4.06	0003	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Ditetapkan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	4.07	0001	Koordinasi penyiapan usulan sertifikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Terlaksananya penyiapan usulan sertifikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertifikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	10	07	4.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	4.08	0001	Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Terlaksananya Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Laporan Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	4.10	0002	Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	07	4.11	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Data tanah adat/ulayat yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	12	7.02	0001	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Terinventarisasinya Tanah - Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data tanah Mlik Masyarakat Miskin	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	10	15	7.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	10	15	7.01	0004	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	Teridentifikasi, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil	Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	11	05	1.01	0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	Usaha	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	11	11	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	11	11	1.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	11	11	1.01	0011	Pengelolaan sampah Regional	Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	Ton	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	11	11	1.01	0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	11	11	1.01	0015	Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Ton	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	11	11	1.01	0016	Pelaksanaan penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota	Terlaksananya penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota	Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/kota	Ton	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	11	11	1.01	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	12	02	1.01	0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	12	02	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	12	02	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	12	02	1.02	0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	12	02	4.01	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	12	04	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Penunjang
2	12	04	1.02	0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	12	05	3.01	0003	Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	12	05	3.02	0001	Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Yang Dibentuk	Dinas	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	12	05	4.01	0003	Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	12	05	4.02	0001	Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Yang Dibentuk	Dinas	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	13	04	1.01	0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	13	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	13	07	4.01	0002	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	13	07	4.04	0001	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - Mama dan Pemuda)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - Mama dan Pemuda)	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	13	07	4.04	0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	13	07	4.04	0003	Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	13	07	4.04	0004	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Unit Air Bersih dan Sanitasi	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	13	07	4.04	0006	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Tersedianya Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Jumlah Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	13	07	4.04	0007	Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Tersedianya Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Jumlah Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	13	07	4.06	0001	Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung	Terlaksananya identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	13	07	4.06	0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	13	07	4.06	0003	Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Terselenggaranya Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	13	07	4.06	0004	Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Tersedianya Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Jumlah Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	13	08	3.01	0002	Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua	Tersedianya Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua	Jumlah Unit Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua yang Disediakan	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	13	08	3.01	0003	Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Unit Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua yang Dibangun	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	13	08	3.01	0004	Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Unit Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua yang Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
2	13	08	3.01	0005	Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Unit Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Dibangun	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	13	08	3.01	0006	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	13	08	3.01	0011	Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	13	08	3.01	0012	Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Terlaksananya Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Jumlah Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	14	04	1.01	0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	14	02	1.02	0012	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Pemetaan Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	14	02	1.02	0013	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Terlaksananya Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	14	04	4.01	0018	Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab/Kota	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	02	1.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	02	1.03	0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	02	1.09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	15	02	1.10	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	15	02	1.11	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	15	02	1.11	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	15	02	1.12	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	02	1.12	0003	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	15	02	4.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ	orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	15	03	1.09	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	03	1.10	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	03	1.10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	03	1.10	0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	15	03	1.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	15	03	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	15	03	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	15	03	3.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran	orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	15	03	4.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran	orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	15	04	3.10	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian	orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	16	03	1.02	0032	Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	16	03	3.01	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi	Tersedianya start-up digital di wilayah provinsi yang dirintis	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah provinsi yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	16	03	3,01	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)	Meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	16	03	3,01	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Meningkatnya literasi digital di masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	16	03	4,01	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi	Tersedianya start-up digital di wilayah provinsi yang dirintis	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah provinsi yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	16	03	4,01	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)	Meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	16	03	4,01	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Meningkatnya literasi digital di masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi&	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	06	1.01	0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	17	06	1.01	0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	17	06	1.01	0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	17	07	1.01	0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	17	07	1.01	0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
2	17	07	1.01	0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	07	1.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	17	07	1.01	0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	07	1.01	0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	07	1.01	0012	Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	17	07	3.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Perdasus/Perkada	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	07	3.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	UMKM	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	17	07	4.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Perdasus/Perkada	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	17	07	4.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	UMKM	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	08	1.01	0003	Pengembangan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	08	1.01	0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	08	1.01	0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	08	3.02	0001	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Terfasilitasinya UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok dan bermitra dengan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	UMKM	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	08	4.02	0001	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Terfasilitasinya UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok dan bermitra dengan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	UMKM	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	09	3.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kelompok Pra Koperasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	09	3.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Koperasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	17	09	4.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kelompok Pra Koperasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	17	09	4.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Koperasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	18	02	1.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	18	02	3.05	0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	18	02	4.05	0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	18	04	1.01	0007	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah	Kegiatan Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	18	04	1.01	0008	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	19	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kegiatan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	02	1.01	0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	02	1.01	0014	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	02	1.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
2	22	05	3.01	0006	Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Terlaksananya Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Jumlah Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Cagar Budaya	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	05	3.01	0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan	Cagar Budaya	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	05	3.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi yang Dikelola	Warisan Budaya Dunia	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	05	3.02	0007	Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Jumlah Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Kegiatan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	05	4.01	0006	Penetapan situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Terlaksananya Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Jumlah Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau Lebih	Cagar Budaya	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
2	22	05	4.01	0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan	Cagar Budaya	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	22	05	4.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi yang Dikelola	Warisan Budaya Dunia	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Diterbitkannya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	03	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	03	1.03	0005	"Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan TangkapPenyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	25	03	1.07	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	03	1,08	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	03	4.13	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	04	1.01	0004	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	Rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	04	1.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	04	1.04	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	04	1.04	0003	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	04	1.04	0004	Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala Mikro dan Kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	04	1.05	0010	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	04	1.05	0014	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	05	1.01	0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	06	1.01	0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	06	1,01	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	1.01	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	1.03	0004	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Meningkatnya ketersediaan bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Ton	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	1,03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	25	06	3.04	0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	3.05	0001	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	3.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	kg/kap/tahun	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	3.07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan	unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	3.08	0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar yang diterbitkan	rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	06	3.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar yang direvitalisasi	unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	4.04	0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Unit Usaha	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	25	06	4.05	0001	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	4.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	kg/kap/tahun	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	4.07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan	unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	25	06	4.08	0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar yang diterbitkan	rekomendasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	25	06	4.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar yang direvitalisasi	unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	02	1.01	0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	02	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan, Kepala Daerah	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	02	1.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	02	1.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	26	02	1.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	02	1.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	02	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	02	1.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	02	1.03	0008	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	02	1.03	0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	26	02	1.04	0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	26	03	3.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	03	3.01	0007	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Lembaga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	03	4.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	03	4.01	0007	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Lembaga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	04	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	04	1.02	0014	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	26	04	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	26	05	1.01	0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	26	05	1.01	0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	Terciptanya produk kreatif melalui kegiatan pendampingan	Jumlah produk kreatif	Produk	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	26	05	1.01	0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Berkembangnya Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	26	05	1.02	0006	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	Lembaga	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	05	3.03	0001	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Laporan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	26	05	4.03	0001	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Laporan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.02	0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.02	0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.02	0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Setek	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.02	0010	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.02	0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.02	0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.02	0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Tersedianya benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalnya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	27	02	1.06	0002	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.07	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.07	0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Dosis	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	03	1.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	03	1.01	0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	03	1.01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	03	1.01	0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	03	1.01	0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	03	1.01	0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	27	03	1,01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	03	1,01	0026	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Peternakan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Peternakan	Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	06	1,01	0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	07	1,01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	27	07	1,01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	27	07	1,02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	27	07	1,02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	27	07	1,03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	27	07	1,03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	30	03	3,01	0004	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi yang diberikan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	30	03	4,01	0004	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi yang diberikan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	30	04	3,01	0003	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Tersedianya bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Jumlah bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP yang difasilitasi	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	30	04	4,01	0004	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Tersedianya bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Jumlah bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP yang difasilitasi	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	30	04	4.01	0005	Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua	Terselenggaranya Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting(bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua	Jumlah Kegiatan Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting(bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua	Kegiatan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
3	30	07	1.03	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kebersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
3	31	02	3.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Dilaksanakan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	31	02	3.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	31	02	3.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	31	02	3.01	0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	31	02	4.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Dilaksanakan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
3	31	02	4.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditasi dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan	Unit	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	31	02	4.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
3	31	02	4.01	0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
3	32	03	2.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Penunjang
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
4	01	09	3.04	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
4	01	09	3.04	0003	Penyediaan Bantuan Akhir Studi	Tersedianya Bantuan Akhir Studi	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
4	01	09	3.04	0004	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
4	01	09	3.04	0005	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Tersedianya Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
4	01	09	3.04	0006	Penyediaan Biaya Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Tersedianya Biaya Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah Biaya Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Biaya	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
4	01	09	3.04	0007	Penyediaan Biaya Afiriasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afiriasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afiriasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
4	01	12	4.03	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
4	01	12	4.03	0003	Penyediaan Bantuan Akhir Studi	Tersedianya Bantuan Akhir Studi	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
4	01	12	4.03	0004	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
4	01	12	4.03	0005	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Tersedianya Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
4	01	12	4.03	0006	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Biaya	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
4	01	12	4.03	0007	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Tidak Langsung
7	01	03	6.01	0005	Penanganan Bencana	Terlaksananya Penanganan Bencana	Jumlah pelaksanaan penanganan bencana	Laporan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
7	01	05	6.01	0001	Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga Kemasyarakatan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
7	03	04	6.01	0006	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	Layanan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
7	03	04	6.01	0007	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Layanan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
7	03	04	6.01	0008	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Layanan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
7	03	04	6.01	0012	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Administrasi	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Administrasi	Layanan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
7	03	04	6.01	0013	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
7	03	04	6.01	0014	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Layanan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
7	03	04	6.01	0015	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Layanan	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	STRATEGI	DAMPAK
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
9	01	02	7.05	0004	Pembinaan Keluarga Islami	Terbinanya Keluarga Islam	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	Keluarga	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Langsung
9	01	02	7.05	0005	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina	Pelaku Ekonomi	3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Tidak Langsung
9	01	04	7.01	0001	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Tersusunnya Perencanaan Ziswaf	Jumlah Dokumen Perencanaan Ziswaf yang Disusun	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
9	01	04	7.02	0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Orang	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
9	01	04	7.02	0002	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Tidak Langsung
9	01	04	7.02	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
9	01	04	7.02	0004	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Dokumen	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Penunjang
9	01	04	7.03	0001	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Dokumen	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
9	01	04	7.03	0002	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
9	01	04	7.03	0003	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
9	01	04	7.03	0004	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
9	01	04	7.03	0005	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
9	01	04	7.03	0006	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
9	01	04	7.03	0007	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
9	01	04	7.03	0008	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
9	01	04	7.03	0009	Pengelolaan Wakaf	Terkelolanya Wakaf	Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
9	01	05	7.02	0001	Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Diberdayakan Ekonominya	Laporan	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Langsung
9	01	05	7.03	0001	Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung
9	01	05	7.03	0002	Perlindungan Sosial Korban Konflik	Terlindunginya Sosial Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Mendapatkan Perlindungan	Orang	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Langsung

b. Positive List Belanja

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
1	5.1.01.89.001.00001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	Terhitung
2	5.1.01.89.002.00001	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler	Terhitung
3	5.1.01.89.003.00001	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	Terhitung
4	5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	Terhitung
5	5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Terhitung
6	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Terhitung
7	5.1.02.01.001.00005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Terhitung
8	5.1.02.01.001.00007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	Terhitung
9	5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Terhitung
10	5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Terhitung
11	5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Terhitung
12	5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	Terhitung
13	5.1.02.01.001.00015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Terhitung
14	5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Terhitung
15	5.1.02.01.001.00020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	Terhitung
16	5.1.02.01.001.00022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Terhitung
17	5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Terhitung
18	5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Terhitung
19	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Terhitung
20	5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Terhitung
21	5.1.02.01.001.00041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	Terhitung
22	5.1.02.01.001.00042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	Terhitung
23	5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Terhitung
24	5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	Terhitung
25	5.1.02.01.001.00045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Terhitung
26	5.1.02.01.001.00055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Terhitung
27	5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Terhitung
28	5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	Terhitung
29	5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Terhitung
30	5.1.02.01.002.00001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	Terhitung
31	5.1.02.01.002.00002	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Pratekan	Terhitung
32	5.1.02.01.002.00003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	Terhitung
33	5.1.02.01.002.00007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	Terhitung
34	5.1.02.01.002.00008	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)	Terhitung
35	5.1.02.01.002.00009	Belanja Pipa-Pipa Baja	Terhitung
36	5.1.02.01.002.00010	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	Terhitung
37	5.1.02.01.002.00011	Belanja Pipa-Pipa Fiber Glass	Terhitung
38	5.1.02.01.002.00012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	Terhitung
39	5.1.02.01.003.00001	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas	Terhitung
40	5.1.02.01.003.00002	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas	Terhitung
41	5.1.02.01.004.00001	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	Terhitung
42	5.1.02.01.004.00002	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	Terhitung
43	5.1.02.01.004.00003	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	Terhitung
44	5.1.02.01.004.00004	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver	Terhitung
45	5.1.02.01.004.00005	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler	Terhitung
46	5.1.02.01.004.00006	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	Terhitung
47	5.1.02.01.004.00007	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	Terhitung
48	5.1.02.01.004.00008	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	Terhitung
49	5.1.02.01.004.00009	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	Terhitung
50	5.1.02.01.004.00010	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	Terhitung
51	5.1.02.01.004.00011	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	Terhitung
52	5.1.02.01.004.00012	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	Terhitung
53	5.1.02.01.004.00013	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger	Terhitung
54	5.1.02.01.004.00014	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	Terhitung
55	5.1.02.01.004.00015	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	Terhitung
56	5.1.02.01.004.00016	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	Terhitung
57	5.1.02.01.004.00017	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	Terhitung
58	5.1.02.01.004.00018	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	Terhitung
59	5.1.02.01.004.00019	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	Terhitung
60	5.1.02.01.004.00020	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	Terhitung
61	5.1.02.01.004.00021	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	Terhitung
62	5.1.02.01.004.00022	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Terhitung
63	5.1.02.01.004.00023	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Terhitung
64	5.1.02.01.004.00024	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	Terhitung
65	5.1.02.01.004.00025	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	Terhitung
66	5.1.02.01.004.00026	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	Terhitung
67	5.1.02.01.004.00027	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	Terhitung
68	5.1.02.01.004.00028	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	Terhitung
69	5.1.02.01.004.00029	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tattoo	Terhitung
70	5.1.02.01.004.00030	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	Terhitung
71	5.1.02.01.004.00031	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam	Terhitung
72	5.1.02.01.004.00032	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	Terhitung
73	5.1.02.01.004.00033	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen	Terhitung
74	5.1.02.01.004.00035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terhitung
75	5.1.02.01.004.00036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Terhitung
76	5.1.02.01.004.00037	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Terhitung
77	5.1.02.01.004.00038	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Terhitung
78	5.1.02.01.004.00039	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
79	5.1.02.01.004.00040	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Terhitung
80	5.1.02.01.004.00041	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	Terhitung
81	5.1.02.01.004.00042	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	Terhitung
82	5.1.02.01.004.00044	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Terhitung
83	5.1.02.01.004.00045	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Terhitung
84	5.1.02.01.004.00046	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Terhitung
85	5.1.02.01.004.00047	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	Terhitung
86	5.1.02.01.004.00048	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	Terhitung
87	5.1.02.01.004.00049	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Terhitung
88	5.1.02.01.004.00050	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Terhitung
89	5.1.02.01.004.00051	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	Terhitung
90	5.1.02.01.004.00052	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Terhitung
91	5.1.02.01.004.00053	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	Terhitung
92	5.1.02.01.004.00054	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	Terhitung
93	5.1.02.01.004.00055	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Terhitung
94	5.1.02.01.004.00056	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	Terhitung
95	5.1.02.01.004.00057	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	Terhitung
96	5.1.02.01.004.00058	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	Terhitung
97	5.1.02.01.004.00059	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	Terhitung
98	5.1.02.01.004.00060	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	Terhitung
99	5.1.02.01.004.00061	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	Terhitung
100	5.1.02.01.004.00062	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	Terhitung
101	5.1.02.01.004.00063	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	Terhitung
102	5.1.02.01.004.00064	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	Terhitung
103	5.1.02.01.004.00065	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	Terhitung
104	5.1.02.01.004.00066	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan	Terhitung
105	5.1.02.01.004.00067	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	Terhitung
106	5.1.02.01.004.00068	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Terhitung
107	5.1.02.01.004.00069	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Terhitung
108	5.1.02.01.004.00070	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	Terhitung
109	5.1.02.01.004.00071	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	Terhitung
110	5.1.02.01.004.00072	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	Terhitung
111	5.1.02.01.004.00073	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	Terhitung
112	5.1.02.01.004.00074	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	Terhitung
113	5.1.02.01.004.00075	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	Terhitung
114	5.1.02.01.004.00076	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	Terhitung
115	5.1.02.01.004.00077	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	Terhitung
116	5.1.02.01.004.00079	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	Terhitung
117	5.1.02.01.004.00080	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	Terhitung
118	5.1.02.01.004.00081	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	Terhitung
119	5.1.02.01.004.00093	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering	Terhitung
120	5.1.02.01.004.00094	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan	Terhitung
121	5.1.02.01.004.00103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Terhitung
122	5.1.02.01.004.00104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Terhitung
123	5.1.02.01.004.00105	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	Terhitung
124	5.1.02.01.004.00106	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	Terhitung
125	5.1.02.01.004.00108	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	Terhitung
126	5.1.02.01.004.00109	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	Terhitung
127	5.1.02.01.004.00110	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
128	5.1.02.01.004.00111	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	Terhitung
129	5.1.02.01.004.00118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Terhitung
130	5.1.02.01.004.00204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	Terhitung
131	5.1.02.01.004.00205	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	Terhitung
132	5.1.02.01.004.00206	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Terhitung
133	5.1.02.01.004.00207	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	Terhitung
134	5.1.02.01.004.00208	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Terhitung
135	5.1.02.01.004.00209	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	Terhitung
136	5.1.02.01.004.00210	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	Terhitung
137	5.1.02.01.004.00211	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Terhitung
138	5.1.02.01.004.00212	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Terhitung
139	5.1.02.01.004.00213	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	Terhitung
140	5.1.02.01.004.00214	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	Terhitung
141	5.1.02.01.004.00215	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Terhitung
142	5.1.02.01.004.00216	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Terhitung
143	5.1.02.01.004.00217	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	Terhitung
144	5.1.02.01.004.00218	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Terhitung
145	5.1.02.01.004.00219	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy	Terhitung
146	5.1.02.01.004.00220	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	Terhitung
147	5.1.02.01.004.00221	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	Terhitung
148	5.1.02.01.004.00222	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	Terhitung
149	5.1.02.01.004.00223	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Terhitung
150	5.1.02.01.004.00224	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	Terhitung
151	5.1.02.01.004.00225	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	Terhitung
152	5.1.02.01.004.00226	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Terhitung
153	5.1.02.01.004.00227	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	Terhitung
154	5.1.02.01.004.00228	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	Terhitung
155	5.1.02.01.004.00229	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	Terhitung
156	5.1.02.01.004.00230	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine	Terhitung
157	5.1.02.01.004.00231	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	Terhitung
158	5.1.02.01.004.00232	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	Terhitung
159	5.1.02.01.004.00243	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Terhitung
160	5.1.02.01.004.00244	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	Terhitung
161	5.1.02.01.004.00245	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	Terhitung
162	5.1.02.01.004.00246	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam	Terhitung
163	5.1.02.01.004.00247	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	Terhitung
164	5.1.02.01.004.00248	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	Terhitung
165	5.1.02.01.004.00308	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	Terhitung
166	5.1.02.01.004.00309	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	Terhitung
167	5.1.02.01.004.00310	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	Terhitung
168	5.1.02.01.004.00311	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	Terhitung
169	5.1.02.01.004.00312	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	Terhitung
170	5.1.02.01.004.00313	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	Terhitung
171	5.1.02.01.004.00314	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	Terhitung
172	5.1.02.01.004.00315	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
173	5.1.02.01.004.00316	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	Terhitung
174	5.1.02.01.004.00317	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	Terhitung
175	5.1.02.01.004.00318	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	Terhitung
176	5.1.02.01.004.00319	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	Terhitung
177	5.1.02.01.004.00320	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	Terhitung
178	5.1.02.01.004.00321	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	Terhitung
179	5.1.02.01.004.00322	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	Terhitung
180	5.1.02.01.004.00323	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	Terhitung
181	5.1.02.01.004.00427	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak	Terhitung
182	5.1.02.01.004.00428	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	Terhitung
183	5.1.02.01.004.00432	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	Terhitung
184	5.1.02.01.004.00433	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	Terhitung
185	5.1.02.01.004.00434	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	Terhitung
186	5.1.02.01.004.00435	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	Terhitung
187	5.1.02.01.004.00437	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	Terhitung
188	5.1.02.01.004.00438	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	Terhitung
189	5.1.02.01.004.00440	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	Terhitung
190	5.1.02.01.004.00441	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit	Terhitung
191	5.1.02.01.004.00463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	Terhitung
192	5.1.02.01.004.00464	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	Terhitung
193	5.1.02.01.004.00465	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	Terhitung
194	5.1.02.01.004.00466	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment	Terhitung
195	5.1.02.01.004.00467	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid, Solid Mixing Equipment	Terhitung
196	5.1.02.01.004.00468	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid, Solid Screening Equipment	Terhitung
197	5.1.02.01.004.00469	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid, Solid Classifier	Terhitung
198	5.1.02.01.004.00470	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid, Liquid Mixing Equipment	Terhitung
199	5.1.02.01.004.00471	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid, Liquid Crystallization Equipment	Terhitung
200	5.1.02.01.004.00472	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	Terhitung
201	5.1.02.01.004.00473	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment	Terhitung
202	5.1.02.01.004.00474	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment	Terhitung
203	5.1.02.01.004.00475	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid, Liquid Filtering Equipment	Terhitung
204	5.1.02.01.004.00476	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid	Terhitung
205	5.1.02.01.004.00477	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	Terhitung
206	5.1.02.01.004.00478	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment	Terhitung
207	5.1.02.01.004.00479	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	Terhitung
208	5.1.02.01.004.00480	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment	Terhitung
209	5.1.02.01.004.00481	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment	Terhitung
210	5.1.02.01.004.00482	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment	Terhitung
211	5.1.02.01.004.00483	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment	Terhitung
212	5.1.02.01.004.00484	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	Terhitung
213	5.1.02.01.004.00485	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid, Material Handling Equipment	Terhitung
214	5.1.02.01.004.00486	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	Terhitung
215	5.1.02.01.004.00487	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment	Terhitung
216	5.1.02.01.004.00488	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment	Terhitung
217	5.1.02.01.004.00489	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process	Terhitung
218	5.1.02.01.004.00490	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
219	5.1.02.01.004.00511	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	Terhitung
220	5.1.02.01.004.00519	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Terhitung
221	5.1.02.01.004.00521	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Terhitung
222	5.1.02.01.004.00524	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Terhitung
223	5.1.02.01.004.00527	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Terhitung
224	5.1.02.01.004.00532	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Terhitung
225	5.1.02.01.004.00534	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	Terhitung
226	5.1.02.01.004.00535	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	Terhitung
227	5.1.02.01.004.00536	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terhitung
228	5.1.02.01.004.00537	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	Terhitung
229	5.1.02.01.004.00538	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	Terhitung
230	5.1.02.01.004.00541	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Terhitung
231	5.1.02.01.004.00543	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	Terhitung
232	5.1.02.01.004.00544	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	Terhitung
233	5.1.02.01.004.00553	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	Terhitung
234	5.1.02.01.004.00556	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	Terhitung
235	5.1.02.01.004.00574	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	Terhitung
236	5.1.02.01.004.00575	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	Terhitung
237	5.1.02.01.004.00576	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Terhitung
238	5.1.02.01.004.00577	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	Terhitung
239	5.1.02.01.004.00578	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	Terhitung
240	5.1.02.01.004.00579	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol	Terhitung
241	5.1.02.01.004.00582	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	Terhitung
242	5.1.02.01.004.00584	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	Terhitung
243	5.1.02.01.004.00585	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	Terhitung
244	5.1.02.01.004.00586	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Terhitung
245	5.1.02.01.004.00587	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	Terhitung
246	5.1.02.01.004.00588	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan	Terhitung
247	5.1.02.01.004.00589	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol	Terhitung
248	5.1.02.01.004.00591	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Terhitung
249	5.1.02.01.004.00592	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	Terhitung
250	5.1.02.01.004.00593	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	Terhitung
251	5.1.02.01.004.00594	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	Terhitung
252	5.1.02.01.004.00595	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	Terhitung
253	5.1.02.01.004.00597	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Terhitung
254	5.1.02.01.004.00598	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	Terhitung
255	5.1.02.01.004.00599	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	Terhitung
256	5.1.02.01.004.00600	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	Terhitung
257	5.1.02.01.004.00601	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	Terhitung
258	5.1.02.01.004.00602	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	Terhitung
259	5.1.02.01.004.00603	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	Terhitung
260	5.1.02.01.004.00605	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	Terhitung
261	5.1.02.01.004.00606	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Terhitung
262	5.1.02.01.004.00607	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	Terhitung
263	5.1.02.01.004.00608	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Terhitung
264	5.1.02.01.004.00609	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	Terhitung
265	5.1.02.01.004.00610	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Terhitung
266	5.1.02.01.004.00611	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut	Terhitung
267	5.1.02.01.004.00613	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Terhitung
268	5.1.02.01.004.00614	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Terhitung
269	5.1.02.01.004.00615	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
270	5.1.02.01.004.00616	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Terhitung
271	5.1.02.01.004.00617	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Terhitung
272	5.1.02.01.004.00618	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Terhitung
273	5.1.02.01.004.00619	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Terhitung
274	5.1.02.01.004.00621	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Terhitung
275	5.1.02.01.004.00622	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	Terhitung
276	5.1.02.01.004.00623	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	Terhitung
277	5.1.02.01.004.00624	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Terhitung
278	5.1.02.01.004.00625	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Terhitung
279	5.1.02.01.004.00626	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Terhitung
280	5.1.02.01.004.00628	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Terhitung
281	5.1.02.01.004.00629	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Terhitung
282	5.1.02.01.004.00630	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Terhitung
283	5.1.02.01.004.00631	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Terhitung
284	5.1.02.01.004.00632	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Terhitung
285	5.1.02.01.004.00633	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Terhitung
286	5.1.02.01.004.00634	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Terhitung
287	5.1.02.01.004.00636	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	Terhitung
288	5.1.02.01.004.00637	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Terhitung
289	5.1.02.01.004.00638	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	Terhitung
290	5.1.02.01.004.00639	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Terhitung
291	5.1.02.01.004.00640	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Terhitung
292	5.1.02.01.004.00642	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	Terhitung
293	5.1.02.01.004.00643	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	Terhitung
294	5.1.02.01.004.00644	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	Terhitung
295	5.1.02.01.004.00645	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	Terhitung
296	5.1.02.01.004.00646	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	Terhitung
297	5.1.02.01.004.00648	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	Terhitung
298	5.1.02.01.004.00649	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	Terhitung
299	5.1.02.01.004.00650	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	Terhitung
300	5.1.02.01.004.00651	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	Terhitung
301	5.1.02.01.004.00653	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan	Terhitung
302	5.1.02.01.004.00654	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Terhitung
303	5.1.02.01.004.00655	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan	Terhitung
304	5.1.02.01.004.00657	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Terhitung
305	5.1.02.01.004.00658	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Terhitung
306	5.1.02.01.004.00659	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	Terhitung
307	5.1.02.01.004.00661	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	Terhitung
308	5.1.02.01.004.00662	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	Terhitung
309	5.1.02.01.004.00663	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	Terhitung
310	5.1.02.01.004.00677	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	Terhitung
311	5.1.02.01.004.00678	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Terhitung
312	5.1.02.01.004.00679	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Terhitung
313	5.1.02.01.004.00681	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di	Terhitung
314	5.1.02.01.004.00683	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	Terhitung
315	5.1.02.01.004.00684	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	Terhitung
316	5.1.02.01.004.00685	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
317	5.1.02.01.004.00687	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Terhitung
318	5.1.02.01.004.00688	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir	Terhitung
319	5.1.02.01.004.00689	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	Terhitung
320	5.1.02.01.004.00691	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Terhitung
321	5.1.02.01.004.00692	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	Terhitung
322	5.1.02.01.004.00693	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	Terhitung
323	5.1.02.01.004.00694	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	Terhitung
324	5.1.02.01.004.00695	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	Terhitung
325	5.1.02.01.004.00696	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	Terhitung
326	5.1.02.01.004.00697	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	Terhitung
327	5.1.02.01.004.00698	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	Terhitung
328	5.1.02.01.004.00700	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	Terhitung
329	5.1.02.01.004.00701	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah	Terhitung
330	5.1.02.01.004.00702	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air	Terhitung
331	5.1.02.01.004.00703	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	Terhitung
332	5.1.02.01.004.00705	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	Terhitung
333	5.1.02.01.004.00706	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Terhitung
334	5.1.02.01.004.00707	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	Terhitung
335	5.1.02.01.004.00708	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM	Terhitung
336	5.1.02.01.004.00710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	Terhitung
337	5.1.02.01.004.00711	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku	Terhitung
338	5.1.02.01.004.00712	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	Terhitung
339	5.1.02.01.004.00713	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	Terhitung
340	5.1.02.01.004.00714	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	Terhitung
341	5.1.02.01.004.00715	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	Terhitung
342	5.1.02.01.004.00716	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Terhitung
343	5.1.02.01.004.00717	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Terhitung
344	5.1.02.01.004.00718	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Terhitung
345	5.1.02.01.004.00719	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	Terhitung
346	5.1.02.01.004.00720	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku	Terhitung
347	5.1.02.01.004.00721	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Terhitung
348	5.1.02.01.004.00751	Belanja Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Potong	Terhitung
349	5.1.02.01.004.00752	Belanja Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Perah	Terhitung
350	5.1.02.01.004.00753	Belanja Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Unggas	Terhitung
351	5.1.02.01.004.00754	Belanja Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya	Terhitung
352	5.1.02.01.004.00756	Belanja Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	Terhitung
353	5.1.02.01.004.00757	Belanja Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	Terhitung
354	5.1.02.01.004.00758	Belanja Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	Terhitung
355	5.1.02.01.004.00764	Belanja Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	Terhitung
356	5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Terhitung
357	5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Terhitung
358	5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Terhitung
359	5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Terhitung
360	5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Terhitung
361	5.1.02.02.001.00021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	Terhitung
362	5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Terhitung
363	5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Terhitung
364	5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Terhitung
365	5.1.02.02.001.00065	Belanja Penambahan Daya	Terhitung
366	5.1.02.02.001.00069	Belanja Pengolahan Air Limbah	Terhitung
367	5.1.02.02.002.00002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	Terhitung
368	5.1.02.02.002.00003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Terhitung
369	5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Terhitung
370	5.1.02.02.002.00009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Terhitung
371	5.1.02.02.004.00001	Belanja Sewa Tractor	Terhitung
372	5.1.02.02.004.00002	Belanja Sewa Grader	Terhitung
373	5.1.02.02.004.00003	Belanja Sewa Excavator	Terhitung
374	5.1.02.02.004.00004	Belanja Sewa Pile Driver	Terhitung
375	5.1.02.02.004.00005	Belanja Sewa Hauler	Terhitung
376	5.1.02.02.004.00006	Belanja Sewa Asphalt Equipment	Terhitung
377	5.1.02.02.004.00007	Belanja Sewa Compacting Equipment	Terhitung
378	5.1.02.02.004.00008	Belanja Sewa Aggregate and Concrete Equipment	Terhitung
379	5.1.02.02.004.00009	Belanja Sewa Loader	Terhitung
380	5.1.02.02.004.00010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	Terhitung
381	5.1.02.02.004.00011	Belanja Sewa Mesin Proses	Terhitung
382	5.1.02.02.004.00012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Terhitung
383	5.1.02.02.004.00013	Belanja Sewa Dredger	Terhitung
384	5.1.02.02.004.00014	Belanja Sewa Floating Excavator	Terhitung
385	5.1.02.02.004.00015	Belanja Sewa Amphibi Dredger	Terhitung
386	5.1.02.02.004.00016	Belanja Sewa Kapal Tarik	Terhitung
387	5.1.02.02.004.00017	Belanja Sewa Mesin Proses Apung	Terhitung
388	5.1.02.02.004.00018	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
389	5.1.02.02.004.00019	Belanja Sewa Alat Penarik	Terhitung
390	5.1.02.02.004.00021	Belanja Sewa Compressor	Terhitung
391	5.1.02.02.004.00022	Belanja Sewa Electric Generating Set	Terhitung
392	5.1.02.02.004.00023	Belanja Sewa Pompa	Terhitung
393	5.1.02.02.004.00024	Belanja Sewa Mesin Bor	Terhitung
394	5.1.02.02.004.00025	Belanja Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan	Terhitung
395	5.1.02.02.004.00026	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor	Terhitung
396	5.1.02.02.004.00027	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	Terhitung
397	5.1.02.02.004.00028	Belanja Sewa Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	Terhitung
398	5.1.02.02.004.00029	Belanja Sewa Mesin Tato	Terhitung
399	5.1.02.02.004.00030	Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan	Terhitung
400	5.1.02.02.004.00031	Belanja Sewa Peralatan Selam	Terhitung
401	5.1.02.02.004.00032	Belanja Sewa Peralatan SAR Mountenering	Terhitung
402	5.1.02.02.004.00033	Belanja Sewa Peralatan Intelijen	Terhitung
403	5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terhitung
404	5.1.02.02.004.00045	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Terhitung
405	5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Terhitung
406	5.1.02.02.004.00038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Terhitung
407	5.1.02.02.004.00039	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Terhitung
408	5.1.02.02.004.00040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Terhitung
409	5.1.02.02.004.00041	Belanja Sewa Kendaraan Tempur	Terhitung
410	5.1.02.02.004.00042	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel	Terhitung
411	5.1.02.02.004.00044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Terhitung
412	5.1.02.02.004.00045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Terhitung
413	5.1.02.02.004.00046	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Terhitung
414	5.1.02.02.004.00047	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	Terhitung
415	5.1.02.02.004.00048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	Terhitung
416	5.1.02.02.004.00049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Terhitung
417	5.1.02.02.004.00050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Terhitung
418	5.1.02.02.004.00051	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	Terhitung
419	5.1.02.02.004.00052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Terhitung
420	5.1.02.02.004.00053	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	Terhitung
421	5.1.02.02.004.00054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	Terhitung
422	5.1.02.02.004.00055	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Terhitung
423	5.1.02.02.004.00056	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	Terhitung
424	5.1.02.02.004.00057	Belanja Sewa Kapal Terbang	Terhitung
425	5.1.02.02.004.00058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	Terhitung
426	5.1.02.02.004.00059	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	Terhitung
427	5.1.02.02.004.00060	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	Terhitung
428	5.1.02.02.004.00061	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik	Terhitung
429	5.1.02.02.004.00063	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin	Terhitung
430	5.1.02.02.004.00064	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kayu	Terhitung
431	5.1.02.02.004.00065	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Khusus	Terhitung
432	5.1.02.02.004.00066	Belanja Sewa Peralatan Las	Terhitung
433	5.1.02.02.004.00067	Belanja Sewa Perkakas Pabrik Es	Terhitung
434	5.1.02.02.004.00068	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Terhitung
435	5.1.02.02.004.00069	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Terhitung
436	5.1.02.02.004.00071	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service	Terhitung
437	5.1.02.02.004.00072	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat	Terhitung
438	5.1.02.02.004.00073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Terhitung
439	5.1.02.02.004.00074	Belanja Sewa Perkakas Khusus (Special Tools)	Terhitung
440	5.1.02.02.004.00075	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja	Terhitung
441	5.1.02.02.004.00076	Belanja Sewa Peralatan Tukang Besi	Terhitung
442	5.1.02.02.004.00077	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu	Terhitung
443	5.1.02.02.004.00079	Belanja Sewa Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	Terhitung
444	5.1.02.02.004.00080	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam	Terhitung
445	5.1.02.02.004.00081	Belanja Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	Terhitung
446	5.1.02.02.004.00093	Belanja Sewa Takaran Kering	Terhitung
447	5.1.02.02.004.00094	Belanja Sewa Takaran Bahan Bangunan	Terhitung
448	5.1.02.02.004.00103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Terhitung
449	5.1.02.02.004.00104	Belanja Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Terhitung
450	5.1.02.02.004.00105	Belanja Sewa Alat Panen	Terhitung
451	5.1.02.02.004.00106	Belanja Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	Terhitung
452	5.1.02.02.004.00108	Belanja Sewa Alat Processing	Terhitung
453	5.1.02.02.004.00109	Belanja Sewa Alat Pasca Panen	Terhitung
454	5.1.02.02.004.00110	Belanja Sewa Alat Produksi Perikanan	Terhitung
455	5.1.02.02.004.00111	Belanja Sewa Alat-Alat Peternakan	Terhitung
456	5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	Terhitung
457	5.1.02.02.004.00169	Belanja Sewa Feeder	Terhitung
458	5.1.02.02.004.00204	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	Terhitung
459	5.1.02.02.004.00205	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gigi	Terhitung
460	5.1.02.02.004.00206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Terhitung
461	5.1.02.02.004.00207	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah	Terhitung
462	5.1.02.02.004.00208	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Terhitung
463	5.1.02.02.004.00209	Belanja Sewa Alat Kedokteran THT	Terhitung
464	5.1.02.02.004.00210	Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata	Terhitung
465	5.1.02.02.004.00211	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Terhitung
466	5.1.02.02.004.00212	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Terhitung
467	5.1.02.02.004.00213	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anak	Terhitung
468	5.1.02.02.004.00214	Belanja Sewa Alat Kedokteran Poliklinik	Terhitung
469	5.1.02.02.004.00215	Belanja Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Terhitung
470	5.1.02.02.004.00216	Belanja Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Terhitung
471	5.1.02.02.004.00217	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jantung	Terhitung
472	5.1.02.02.004.00218	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Terhitung
473	5.1.02.02.004.00219	Belanja Sewa Alat Kedokteran Patologi Anatomy	Terhitung
474	5.1.02.02.004.00220	Belanja Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah	Terhitung
475	5.1.02.02.004.00221	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radioterapi	Terhitung
476	5.1.02.02.004.00222	Belanja Sewa Alat Kedokteran Nuklir	Terhitung
477	5.1.02.02.004.00223	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
478	5.1.02.02.004.00224	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat	Terhitung
479	5.1.02.02.004.00225	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jiwa	Terhitung
480	5.1.02.02.004.00226	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Terhitung
481	5.1.02.02.004.00227	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICU	Terhitung
482	5.1.02.02.004.00228	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICCU	Terhitung
483	5.1.02.02.004.00229	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung	Terhitung
484	5.1.02.02.004.00230	Belanja Sewa Alat Kedokteran Traditional Medicine	Terhitung
485	5.1.02.02.004.00231	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anestesi	Terhitung
486	5.1.02.02.004.00232	Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya	Terhitung
487	5.1.02.02.004.00243	Belanja Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Terhitung
488	5.1.02.02.004.00244	Belanja Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	Terhitung
489	5.1.02.02.004.00245	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	Terhitung
490	5.1.02.02.004.00246	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam	Terhitung
491	5.1.02.02.004.00247	Belanja Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	Terhitung
492	5.1.02.02.004.00248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	Terhitung
493	5.1.02.02.004.00308	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	Terhitung
494	5.1.02.02.004.00309	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	Terhitung
495	5.1.02.02.004.00310	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	Terhitung
496	5.1.02.02.004.00311	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	Terhitung
497	5.1.02.02.004.00312	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	Terhitung
498	5.1.02.02.004.00313	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	Terhitung
499	5.1.02.02.004.00314	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	Terhitung
500	5.1.02.02.004.00315	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	Terhitung
501	5.1.02.02.004.00316	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	Terhitung
502	5.1.02.02.004.00317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	Terhitung
503	5.1.02.02.004.00318	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	Terhitung
504	5.1.02.02.004.00319	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN	Terhitung
505	5.1.02.02.004.00320	Belanja Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungtu)	Terhitung
506	5.1.02.02.004.00321	Belanja Sewa Alat Peraga Kejuruan	Terhitung
507	5.1.02.02.004.00322	Belanja Sewa Alat Peraga PAUD/TK	Terhitung
508	5.1.02.02.004.00323	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	Terhitung
509	5.1.02.02.004.00415	Belanja Sewa Mekanik	Terhitung
510	5.1.02.02.004.00427	Belanja Sewa Peralatan Sumur Minyak	Terhitung
511	5.1.02.02.004.00428	Belanja Sewa Sumur Pemboran	Terhitung
512	5.1.02.02.004.00432	Belanja Sewa Alat Pengolahan Minyak	Terhitung
513	5.1.02.02.004.00433	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air	Terhitung
514	5.1.02.02.004.00434	Belanja Sewa Alat Pengolahan Steam	Terhitung
515	5.1.02.02.004.00435	Belanja Sewa Alat Pengolahan Wax	Terhitung
516	5.1.02.02.004.00438	Belanja Sewa Elektrik	Terhitung
517	5.1.02.02.004.00440	Belanja Sewa Perawatan Sumur	Terhitung
518	5.1.02.02.004.00441	Belanja Sewa Tes Unit	Terhitung
519	5.1.02.02.004.00463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	Terhitung
520	5.1.02.02.004.00464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan	Terhitung
521	5.1.02.02.004.00465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	Terhitung
522	5.1.02.02.004.00466	Belanja Sewa Liquid-Liquid Contractor Equipment	Terhitung
523	5.1.02.02.004.00467	Belanja Sewa Solid-Solid Mixing Equipment	Terhitung
524	5.1.02.02.004.00468	Belanja Sewa Solid-Solid Screening Equipment	Terhitung
525	5.1.02.02.004.00469	Belanja Sewa Solid-Solid Classifier	Terhitung
526	5.1.02.02.004.00470	Belanja Sewa Solid-Liquid Mixing Equipment	Terhitung
527	5.1.02.02.004.00471	Belanja Sewa Solid Liquid Crystallization Equipment	Terhitung
528	5.1.02.02.004.00472	Belanja Sewa Ion Exchange Absortion Equipment	Terhitung
529	5.1.02.02.004.00473	Belanja Sewa Leaching Equipment	Terhitung
530	5.1.02.02.004.00474	Belanja Sewa Gravity Sedimentation Equipment	Terhitung
531	5.1.02.02.004.00475	Belanja Sewa Solid Liquid Filtering Equipment	Terhitung
532	5.1.02.02.004.00476	Belanja Sewa Centrifuge for Solid Liquid	Terhitung
533	5.1.02.02.004.00477	Belanja Sewa Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	Terhitung
534	5.1.02.02.004.00478	Belanja Sewa Gas-Solid Drying Equipment	Terhitung
535	5.1.02.02.004.00479	Belanja Sewa Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	Terhitung
536	5.1.02.02.004.00480	Belanja Sewa Gas-Solid Separation Equipment	Terhitung
537	5.1.02.02.004.00481	Belanja Sewa Gas-Liquid Distillation Equipment	Terhitung
538	5.1.02.02.004.00482	Belanja Sewa Gas-Liquid Separation Equipment	Terhitung
539	5.1.02.02.004.00483	Belanja Sewa Isotope Separation Equipment	Terhitung
540	5.1.02.02.004.00484	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	Terhitung
541	5.1.02.02.004.00485	Belanja Sewa Solid Material Handling Equipment	Terhitung
542	5.1.02.02.004.00486	Belanja Sewa Size Reduction Size Balargement Equipment	Terhitung
543	5.1.02.02.004.00487	Belanja Sewa Heat Generating Equipment	Terhitung
544	5.1.02.02.004.00488	Belanja Sewa Heat Transfer Equipment	Terhitung
545	5.1.02.02.004.00489	Belanja Sewa Mechanical Process	Terhitung
546	5.1.02.02.004.00490	Belanja Sewa Chemical Reaction Equipment	Terhitung
547	5.1.02.02.005.00002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	Terhitung
548	5.1.02.02.005.00010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Terhitung
549	5.1.02.02.005.00012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Terhitung
550	5.1.02.02.005.00015	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Terhitung
551	5.1.02.02.005.00018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Terhitung
552	5.1.02.02.005.00023	Belanja Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Terhitung
553	5.1.02.02.005.00025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	Terhitung
554	5.1.02.02.005.00026	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sekam	Terhitung
555	5.1.02.02.005.00027	Belanja Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terhitung
556	5.1.02.02.005.00028	Belanja Sewa Bangunan Industri	Terhitung
557	5.1.02.02.005.00029	Belanja Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan	Terhitung
558	5.1.02.02.005.00032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	Terhitung
559	5.1.02.02.005.00034	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pabrik	Terhitung
560	5.1.02.02.005.00035	Belanja Sewa Bangunan Stasiun Bus	Terhitung
561	5.1.02.02.005.00044	Belanja Sewa Motel	Terhitung
562	5.1.02.02.005.00047	Belanja Sewa Panti Asuhan	Terhitung
563	5.1.02.02.006.00001	Belanja Sewa Jalan Nasional	Terhitung
564	5.1.02.02.006.00002	Belanja Sewa Jalan Provinsi	Terhitung
565	5.1.02.02.006.00003	Belanja Sewa Jalan Kabupaten	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
566	5.1.02.02.006.00004	Belanja Sewa Jalan Kota	Terhitung
567	5.1.02.02.006.00005	Belanja Sewa Jalan Desa	Terhitung
568	5.1.02.02.006.00006	Belanja Sewa Jalan Tol	Terhitung
569	5.1.02.02.006.00009	Belanja Sewa Jalan Khusus	Terhitung
570	5.1.02.02.006.00011	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Nasional	Terhitung
571	5.1.02.02.006.00012	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi	Terhitung
572	5.1.02.02.006.00013	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten	Terhitung
573	5.1.02.02.006.00014	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kota	Terhitung
574	5.1.02.02.006.00015	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Desa	Terhitung
575	5.1.02.02.006.00016	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Tol	Terhitung
576	5.1.02.02.006.00018	Belanja Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Terhitung
577	5.1.02.02.006.00019	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Khusus	Terhitung
578	5.1.02.02.006.00020	Belanja Sewa Jembatan Penyeberangan	Terhitung
579	5.1.02.02.006.00021	Belanja Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	Terhitung
580	5.1.02.02.006.00022	Belanja Sewa Jembatan Pengukur	Terhitung
581	5.1.02.02.006.00024	Belanja Sewa Bangunan Waduk Irigasi	Terhitung
582	5.1.02.02.006.00025	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi	Terhitung
583	5.1.02.02.006.00026	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Irigasi	Terhitung
584	5.1.02.02.006.00027	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Irigasi	Terhitung
585	5.1.02.02.006.00028	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Irigasi	Terhitung
586	5.1.02.02.006.00029	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi	Terhitung
587	5.1.02.02.006.00030	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi	Terhitung
588	5.1.02.02.006.00031	Belanja Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya	Terhitung
589	5.1.02.02.006.00032	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut	Terhitung
590	5.1.02.02.006.00033	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Terhitung
591	5.1.02.02.006.00034	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut	Terhitung
592	5.1.02.02.006.00035	Belanja Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut	Terhitung
593	5.1.02.02.006.00036	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut	Terhitung
594	5.1.02.02.006.00037	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Terhitung
595	5.1.02.02.006.00038	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut	Terhitung
596	5.1.02.02.006.00039	Belanja Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Terhitung
597	5.1.02.02.006.00040	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Terhitung
598	5.1.02.02.006.00041	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Terhitung
599	5.1.02.02.006.00042	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Terhitung
600	5.1.02.02.006.00043	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Terhitung
601	5.1.02.02.006.00044	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Terhitung
602	5.1.02.02.006.00045	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Terhitung
603	5.1.02.02.006.00046	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Terhitung
604	5.1.02.02.006.00048	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Terhitung
605	5.1.02.02.006.00049	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	Terhitung
606	5.1.02.02.006.00050	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	Terhitung
607	5.1.02.02.006.00051	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Terhitung
608	5.1.02.02.006.00052	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Terhitung
609	5.1.02.02.006.00053	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Terhitung
610	5.1.02.02.006.00055	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Terhitung
611	5.1.02.02.006.00056	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Terhitung
612	5.1.02.02.006.00057	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Terhitung
613	5.1.02.02.006.00058	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Terhitung
614	5.1.02.02.006.00059	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Terhitung
615	5.1.02.02.006.00060	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Terhitung
616	5.1.02.02.006.00061	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Terhitung
617	5.1.02.02.006.00063	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	Terhitung
618	5.1.02.02.006.00064	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Terhitung
619	5.1.02.02.006.00065	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	Terhitung
620	5.1.02.02.006.00066	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Terhitung
621	5.1.02.02.006.00067	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Terhitung
622	5.1.02.02.006.00069	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor	Terhitung
623	5.1.02.02.006.00070	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Kotor	Terhitung
624	5.1.02.02.006.00071	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor	Terhitung
625	5.1.02.02.006.00072	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor	Terhitung
626	5.1.02.02.006.00073	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor	Terhitung
627	5.1.02.02.006.00075	Belanja Sewa Instalasi Air Permukaan	Terhitung
628	5.1.02.02.006.00076	Belanja Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air	Terhitung
629	5.1.02.02.006.00077	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dalam	Terhitung
630	5.1.02.02.006.00078	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal	Terhitung
631	5.1.02.02.006.00080	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Domestik	Terhitung
632	5.1.02.02.006.00081	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Industri	Terhitung
633	5.1.02.02.006.00082	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian	Terhitung
634	5.1.02.02.006.00084	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Terhitung
635	5.1.02.02.006.00085	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Terhitung
636	5.1.02.02.006.00086	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sampah	Terhitung
637	5.1.02.02.006.00088	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	Terhitung
638	5.1.02.02.006.00089	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	Terhitung
639	5.1.02.02.006.00090	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	Terhitung
640	5.1.02.02.006.00104	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk	Terhitung
641	5.1.02.02.006.00105	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Terhitung
642	5.1.02.02.006.00106	Belanja Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Terhitung
643	5.1.02.02.006.00108	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan di Darat	Terhitung
644	5.1.02.02.006.00110	Belanja Sewa Instalasi Gardu Gas	Terhitung
645	5.1.02.02.006.00111	Belanja Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas	Terhitung
646	5.1.02.02.006.00112	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Gas	Terhitung
647	5.1.02.02.006.00114	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Terhitung
648	5.1.02.02.006.00115	Belanja Sewa Instalasi Reaktor Nuklir	Terhitung
649	5.1.02.02.006.00116	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	Terhitung
650	5.1.02.02.006.00118	Belanja Sewa Instalasi Lain	Terhitung
651	5.1.02.02.006.00119	Belanja Sewa Jaringan Pembawa	Terhitung
652	5.1.02.02.006.00120	Belanja Sewa Jaringan Induk Distribusi	Terhitung
653	5.1.02.02.006.00121	Belanja Sewa Jaringan Cabang Distribusi	Terhitung
654	5.1.02.02.006.00122	Belanja Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
655	5.1.02.02.006.00123	Belanja Sewa Jaringan Air Minum Lainnya	Terhitung
656	5.1.02.02.006.00124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi	Terhitung
657	5.1.02.02.006.00125	Belanja Sewa Jaringan Distribusi	Terhitung
658	5.1.02.02.006.00127	Belanja Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah	Terhitung
659	5.1.02.02.006.00128	Belanja Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah	Terhitung
660	5.1.02.02.006.00129	Belanja Sewa Jaringan Telepon di dalam Air	Terhitung
661	5.1.02.02.006.00130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	Terhitung
662	5.1.02.02.006.00132	Belanja Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi	Terhitung
663	5.1.02.02.006.00133	Belanja Sewa Jaringan Pipa Distribusi	Terhitung
664	5.1.02.02.006.00134	Belanja Sewa Jaringan Pipa Dinas	Terhitung
665	5.1.02.02.006.00135	Belanja Sewa Jaringan BBM	Terhitung
666	5.1.02.02.007.00001	Belanja Sewa Buku Umum	Terhitung
667	5.1.02.02.007.00002	Belanja Sewa Buku Filsafat	Terhitung
668	5.1.02.02.007.00003	Belanja Sewa Buku Agama	Terhitung
669	5.1.02.02.007.00004	Belanja Sewa Buku Ilmu Sosial	Terhitung
670	5.1.02.02.007.00005	Belanja Sewa Buku Ilmu Bahasa	Terhitung
671	5.1.02.02.007.00006	Belanja Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	Terhitung
672	5.1.02.02.007.00007	Belanja Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Terhitung
673	5.1.02.02.007.00008	Belanja Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Terhitung
674	5.1.02.02.007.00009	Belanja Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Terhitung
675	5.1.02.02.007.00010	Belanja Sewa Serial	Terhitung
676	5.1.02.02.007.00011	Belanja Sewa Buku Laporan	Terhitung
677	5.1.02.02.007.00012	Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Terhitung
678	5.1.02.02.007.00042	Belanja Sewa Ternak Potong	Terhitung
679	5.1.02.02.007.00043	Belanja Sewa Ternak Perah	Terhitung
680	5.1.02.02.007.00044	Belanja Sewa Ternak Unggas	Terhitung
681	5.1.02.02.007.00045	Belanja Sewa Ternak Lainnya	Terhitung
682	5.1.02.02.007.00046	Belanja Sewa Hewan Lainnya	Terhitung
683	5.1.02.02.007.00047	Belanja Sewa Ikan Budidaya	Terhitung
684	5.1.02.02.007.00048	Belanja Sewa Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)	Terhitung
685	5.1.02.02.007.00049	Belanja Sewa Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)	Terhitung
686	5.1.02.02.007.00050	Belanja Sewa Coelenterata Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)	Terhitung
687	5.1.02.02.007.00055	Belanja Sewa Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	Terhitung
688	5.1.02.02.010.00001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	Terhitung
689	5.1.02.02.010.00002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	Terhitung
690	5.1.02.02.010.00003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	Terhitung
691	5.1.02.02.010.00004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	Terhitung
692	5.1.02.02.010.00005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Terhitung
693	5.1.02.02.010.00006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	Terhitung
694	5.1.02.02.010.00007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	Terhitung
695	5.1.02.02.010.00009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	Terhitung
696	5.1.02.02.010.00011	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi	Terhitung
697	5.1.02.02.010.00017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	Terhitung
698	5.1.02.02.010.00019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	Terhitung
699	5.1.02.02.014.00010	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	Terhitung
700	5.1.02.02.014.00012	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	Terhitung
701	5.1.02.02.014.00016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	Terhitung
702	5.1.02.02.014.00020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Terhitung
703	5.1.02.02.014.00021	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	Terhitung
704	5.1.02.02.014.00023	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	Terhitung
705	5.1.02.03.002.00001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	Terhitung
706	5.1.02.03.002.00002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	Terhitung
707	5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	Terhitung
708	5.1.02.03.002.00004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver	Terhitung
709	5.1.02.03.002.00005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler	Terhitung
710	5.1.02.03.002.00006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	Terhitung
711	5.1.02.03.002.00007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	Terhitung
712	5.1.02.03.002.00009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	Terhitung
713	5.1.02.03.002.00010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	Terhitung
714	5.1.02.03.002.00011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	Terhitung
715	5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	Terhitung
716	5.1.02.03.002.00013	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger	Terhitung
717	5.1.02.03.002.00014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	Terhitung
718	5.1.02.03.002.00015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	Terhitung
719	5.1.02.03.002.00016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	Terhitung
720	5.1.02.03.002.00017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	Terhitung
721	5.1.02.03.002.00018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	Terhitung
722	5.1.02.03.002.00019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	Terhitung
723	5.1.02.03.002.00020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	Terhitung
724	5.1.02.03.002.00021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	Terhitung
725	5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Terhitung
726	5.1.02.03.002.00023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Terhitung
727	5.1.02.03.002.00024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	Terhitung
728	5.1.02.03.002.00025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	Terhitung
729	5.1.02.03.002.00026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	Terhitung
730	5.1.02.03.002.00027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	Terhitung
731	5.1.02.03.002.00028	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
732	5.1.02.03.002.00029	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tato	Terhitung
733	5.1.02.03.002.00030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	Terhitung
734	5.1.02.03.002.00031	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam	Terhitung
735	5.1.02.03.002.00032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	Terhitung
736	5.1.02.03.002.00033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen	Terhitung
737	5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	Terhitung
738	5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terhitung
739	5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Terhitung
740	5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Terhitung
741	5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Terhitung
742	5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Terhitung
743	5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Terhitung
744	5.1.02.03.002.00041	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	Terhitung
745	5.1.02.03.002.00042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	Terhitung
746	5.1.02.03.002.00043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Terhitung
747	5.1.02.03.002.00044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Terhitung
748	5.1.02.03.002.00045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Terhitung
749	5.1.02.03.002.00046	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Terhitung
750	5.1.02.03.002.00058	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	Terhitung
751	5.1.02.03.002.00059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	Terhitung
752	5.1.02.03.002.00068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Terhitung
753	5.1.02.03.002.00069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Terhitung
754	5.1.02.03.002.00070	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	Terhitung
755	5.1.02.03.002.00071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	Terhitung
756	5.1.02.03.002.00072	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	Terhitung
757	5.1.02.03.002.00073	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	Terhitung
758	5.1.02.03.002.00074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	Terhitung
759	5.1.02.03.002.00075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	Terhitung
760	5.1.02.03.002.00076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	Terhitung
761	5.1.02.03.002.00103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Terhitung
762	5.1.02.03.002.00104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Terhitung
763	5.1.02.03.002.00105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	Terhitung
764	5.1.02.03.002.00110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	Terhitung
765	5.1.02.03.002.00111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	Terhitung
766	5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Terhitung
767	5.1.02.03.002.00169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder	Terhitung
768	5.1.02.03.002.00170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity Control	Terhitung
769	5.1.02.03.002.00171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	Terhitung
770	5.1.02.03.002.00172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	Terhitung
771	5.1.02.03.002.00173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF	Terhitung
772	5.1.02.03.002.00174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	Terhitung
773	5.1.02.03.002.00175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF	Terhitung
774	5.1.02.03.002.00176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	Terhitung
775	5.1.02.03.002.00177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF	Terhitung
776	5.1.02.03.002.00178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF	Terhitung
777	5.1.02.03.002.00179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	Terhitung
778	5.1.02.03.002.00180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	Terhitung
779	5.1.02.03.002.00181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	Terhitung
780	5.1.02.03.002.00182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	Terhitung
781	5.1.02.03.002.00183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	Terhitung
782	5.1.02.03.002.00184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
783	5.1.02.03.002.00185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	Terhitung
784	5.1.02.03.002.00186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	Terhitung
785	5.1.02.03.002.00187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	Terhitung
786	5.1.02.03.002.00188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	Terhitung
787	5.1.02.03.002.00189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	Terhitung
788	5.1.02.03.002.00190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	Terhitung
789	5.1.02.03.002.00191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	Terhitung
790	5.1.02.03.002.00192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	Terhitung
791	5.1.02.03.002.00193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	Terhitung
792	5.1.02.03.002.00194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	Terhitung
793	5.1.02.03.002.00195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	Terhitung
794	5.1.02.03.002.00196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	Terhitung
795	5.1.02.03.002.00197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi; Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	Terhitung
796	5.1.02.03.002.00208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Terhitung
797	5.1.02.03.002.00209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	Terhitung
798	5.1.02.03.002.00210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	Terhitung
799	5.1.02.03.002.00211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Terhitung
800	5.1.02.03.002.00212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Terhitung
801	5.1.02.03.002.00213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	Terhitung
802	5.1.02.03.002.00273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Terhitung
803	5.1.02.03.002.00274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	Terhitung
804	5.1.02.03.002.00275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	Terhitung
805	5.1.02.03.002.00276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik	Terhitung
806	5.1.02.03.002.00277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Terhitung
807	5.1.02.03.002.00279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	Terhitung
808	5.1.02.03.002.00280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	Terhitung
809	5.1.02.03.002.00281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	Terhitung
810	5.1.02.03.002.00282	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	Terhitung
811	5.1.02.03.002.00283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Terhitung
812	5.1.02.03.002.00284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	Terhitung
813	5.1.02.03.002.00285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	Terhitung
814	5.1.02.03.002.00286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	Terhitung
815	5.1.02.03.002.00287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang	Terhitung
816	5.1.02.03.002.00288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	Terhitung
817	5.1.02.03.002.00365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Lainnya	Terhitung
818	5.1.02.03.002.00366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	Terhitung
819	5.1.02.03.002.00370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	Terhitung
820	5.1.02.03.002.00371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	Terhitung
821	5.1.02.03.002.00372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus	Terhitung
822	5.1.02.03.002.00373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	Terhitung
823	5.1.02.03.002.00375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	Terhitung
824	5.1.02.03.002.00376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	Terhitung
825	5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Terhitung
826	5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Terhitung
827	5.1.02.03.002.00428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	Terhitung
828	5.1.02.03.002.00429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya	Terhitung
829	5.1.02.03.002.00430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG	Terhitung
830	5.1.02.03.002.00431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya	Terhitung
831	5.1.02.03.002.00432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	Terhitung
832	5.1.02.03.002.00433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	Terhitung
833	5.1.02.03.002.00434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
834	5.1.02.03.002.00435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	Terhitung
835	5.1.02.03.002.00436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	Terhitung
836	5.1.02.03.002.00437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	Terhitung
837	5.1.02.03.002.00438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	Terhitung
838	5.1.02.03.002.00439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	Terhitung
839	5.1.02.03.002.00440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	Terhitung
840	5.1.02.03.002.00441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit	Terhitung
841	5.1.02.03.002.00442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	Terhitung
842	5.1.02.03.002.00443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi	Terhitung
843	5.1.02.03.002.00444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara	Terhitung
844	5.1.02.03.002.00445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	Terhitung
845	5.1.02.03.002.00446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	Terhitung
846	5.1.02.03.002.00447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	Terhitung
847	5.1.02.03.002.00448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	Terhitung
848	5.1.02.03.002.00449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman	Terhitung
849	5.1.02.03.002.00450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	Terhitung
850	5.1.02.03.002.00451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	Terhitung
851	5.1.02.03.002.00452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	Terhitung
852	5.1.02.03.002.00453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	Terhitung
853	5.1.02.03.002.00454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	Terhitung
854	5.1.02.03.002.00455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	Terhitung
855	5.1.02.03.002.00476	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid	Terhitung
856	5.1.02.03.002.00484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	Terhitung
857	5.1.02.03.002.00486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	Terhitung
858	5.1.02.03.002.00489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process	Terhitung
859	5.1.02.03.002.00492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	Terhitung
860	5.1.02.03.002.00497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light	Terhitung
861	5.1.02.03.002.00499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal	Terhitung
862	5.1.02.03.002.00500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights	Terhitung
863	5.1.02.03.002.00501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	Terhitung
864	5.1.02.03.002.00502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Terhitung
865	5.1.02.03.002.00503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	Terhitung
866	5.1.02.03.002.00506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	Terhitung
867	5.1.02.03.002.00508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	Terhitung
868	5.1.02.03.002.00509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	Terhitung
869	5.1.02.03.003.00009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Terhitung
870	5.1.02.03.003.00012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Terhitung
871	5.1.02.03.003.00031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	Terhitung
872	5.1.02.03.003.00032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Terhitung
873	5.1.02.03.003.00033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	Terhitung
874	5.1.02.03.003.00034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	Terhitung
875	5.1.02.03.003.00035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	Terhitung
876	5.1.02.03.003.00038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	Terhitung
877	5.1.02.03.003.00040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Terhitung
878	5.1.02.03.003.00041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Terhitung
879	5.1.02.03.003.00042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	Terhitung
880	5.1.02.03.003.00043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	Terhitung
881	5.1.02.03.003.00044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	Terhitung
882	5.1.02.03.003.00045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	Terhitung
883	5.1.02.03.003.00047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	Terhitung
884	5.1.02.03.003.00048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	Terhitung
885	5.1.02.03.003.00049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	Terhitung
886	5.1.02.03.003.00050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Terhitung
887	5.1.02.03.003.00051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	Terhitung
888	5.1.02.03.003.00053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	Terhitung
889	5.1.02.03.003.00054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	Terhitung
890	5.1.02.03.003.00055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	Terhitung
891	5.1.02.03.003.00056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	Terhitung
892	5.1.02.03.003.00057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	Terhitung
893	5.1.02.03.003.00058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas	Terhitung
894	5.1.02.03.003.00059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
895	5.1.02.03.003.00061	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	Terhitung
896	5.1.02.03.003.00062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Terhitung
897	5.1.02.03.003.00063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Terhitung
898	5.1.02.03.003.00064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	Terhitung
899	5.1.02.03.004.00001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	Terhitung
900	5.1.02.03.004.00002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	Terhitung
901	5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Terhitung
902	5.1.02.03.004.00005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	Terhitung
903	5.1.02.03.004.00006	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol	Terhitung
904	5.1.02.03.004.00007	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api	Terhitung
905	5.1.02.03.004.00008	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	Terhitung
906	5.1.02.03.004.00009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	Terhitung
907	5.1.02.03.004.00010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Terhitung
908	5.1.02.03.004.00011	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	Terhitung
909	5.1.02.03.004.00013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Terhitung
910	5.1.02.03.004.00014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	Terhitung
911	5.1.02.03.004.00015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	Terhitung
912	5.1.02.03.004.00016	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol	Terhitung
913	5.1.02.03.004.00017	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api	Terhitung
914	5.1.02.03.004.00018	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Terhitung
915	5.1.02.03.004.00020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	Terhitung
916	5.1.02.03.004.00021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	Terhitung
917	5.1.02.03.004.00022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	Terhitung
918	5.1.02.03.004.00023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Terhitung
919	5.1.02.03.004.00024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Terhitung
920	5.1.02.03.004.00025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	Terhitung
921	5.1.02.03.004.00026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	Terhitung
922	5.1.02.03.004.00027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	Terhitung
923	5.1.02.03.004.00028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	Terhitung
924	5.1.02.03.004.00029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	Terhitung
925	5.1.02.03.004.00030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	Terhitung
926	5.1.02.03.004.00031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Terhitung
927	5.1.02.03.004.00032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	Terhitung
928	5.1.02.03.004.00033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Terhitung
929	5.1.02.03.004.00034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	Terhitung
930	5.1.02.03.004.00035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Terhitung
931	5.1.02.03.004.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	Terhitung
932	5.1.02.03.004.00037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Terhitung
933	5.1.02.03.004.00038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut	Terhitung
934	5.1.02.03.004.00039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Terhitung
935	5.1.02.03.004.00040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Terhitung
936	5.1.02.03.004.00041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Terhitung
937	5.1.02.03.004.00042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Terhitung
938	5.1.02.03.004.00043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Terhitung
939	5.1.02.03.004.00044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Terhitung
940	5.1.02.03.004.00045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Terhitung
941	5.1.02.03.004.00046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Terhitung
942	5.1.02.03.004.00047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	Terhitung
943	5.1.02.03.004.00048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	Terhitung
944	5.1.02.03.004.00049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	Terhitung
945	5.1.02.03.004.00050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	Terhitung
946	5.1.02.03.004.00051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Terhitung
947	5.1.02.03.004.00052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Terhitung
948	5.1.02.03.004.00053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Terhitung
949	5.1.02.03.004.00054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Terhitung
950	5.1.02.03.004.00055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Terhitung
951	5.1.02.03.004.00056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Terhitung
952	5.1.02.03.004.00057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Terhitung
953	5.1.02.03.004.00058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
954	5.1.02.03.004.00059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Terhitung
955	5.1.02.03.004.00060	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Terhitung
956	5.1.02.03.004.00061	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Terhitung
957	5.1.02.03.004.00063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	Terhitung
958	5.1.02.03.004.00064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Terhitung
959	5.1.02.03.004.00065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	Terhitung
960	5.1.02.03.004.00066	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Terhitung
961	5.1.02.03.004.00067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Terhitung
962	5.1.02.03.004.00069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	Terhitung
963	5.1.02.03.004.00070	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	Terhitung
964	5.1.02.03.004.00071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	Terhitung
965	5.1.02.03.004.00072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	Terhitung
966	5.1.02.03.004.00073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	Terhitung
967	5.1.02.03.004.00075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	Terhitung
968	5.1.02.03.004.00076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	Terhitung
969	5.1.02.03.004.00077	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	Terhitung
970	5.1.02.03.004.00078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	Terhitung
971	5.1.02.03.004.00079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Terhitung
972	5.1.02.03.004.00080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	Terhitung
973	5.1.02.03.004.00081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Terhitung
974	5.1.02.03.004.00082	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	Terhitung
975	5.1.02.03.004.00083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	Terhitung
976	5.1.02.03.004.00084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Terhitung
977	5.1.02.03.004.00085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Terhitung
978	5.1.02.03.004.00086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung	Terhitung
979	5.1.02.03.004.00087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Terhitung
980	5.1.02.03.004.00088	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	Terhitung
981	5.1.02.03.004.00089	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	Terhitung
982	5.1.02.03.004.00090	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	Terhitung
983	5.1.02.03.004.00092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Terhitung
984	5.1.02.03.004.00093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Terhitung
985	5.1.02.03.004.00094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	Terhitung
986	5.1.02.03.004.00095	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	Terhitung
987	5.1.02.03.004.00097	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Terhitung
988	5.1.02.03.004.00098	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Terhitung
989	5.1.02.03.004.00099	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Terhitung
990	5.1.02.03.004.00100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Terhitung
991	5.1.02.03.004.00102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	Terhitung
992	5.1.02.03.004.00103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	Terhitung
993	5.1.02.03.004.00104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	Terhitung
994	5.1.02.03.004.00105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Terhitung
995	5.1.02.03.004.00106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Terhitung
996	5.1.02.03.004.00107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	Terhitung
997	5.1.02.03.004.00108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	Terhitung
998	5.1.02.03.004.00109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya	Terhitung
999	5.1.02.03.004.00110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	Terhitung
1000	5.1.02.03.004.00111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	Terhitung
1001	5.1.02.03.004.00112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas	Terhitung
1002	5.1.02.03.004.00113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	Terhitung
1003	5.1.02.03.004.00119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	Terhitung
1004	5.1.02.03.004.00120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	Terhitung
1005	5.1.02.03.004.00121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	Terhitung
1006	5.1.02.03.004.00122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	Terhitung
1007	5.1.02.03.004.00123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	Terhitung
1008	5.1.02.03.004.00124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	Terhitung
1009	5.1.02.03.004.00125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	Terhitung
1010	5.1.02.03.005.00007	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Terhitung
1011	5.1.02.03.005.00008	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Terhitung
1012	5.1.02.03.005.00009	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Terhitung
1013	5.1.02.03.005.00010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	Terhitung
1014	5.1.02.03.005.00011	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
1015	5.1.02.03.005.00012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Terhitung
1016	5.1.02.03.005.00042	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong	Terhitung
1017	5.1.02.03.005.00043	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah	Terhitung
1018	5.1.02.03.005.00044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas	Terhitung
1019	5.1.02.03.005.00045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	Terhitung
1020	5.1.02.03.005.00047	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	Terhitung
1021	5.1.02.03.005.00048	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	Terhitung
1022	5.1.02.03.005.00049	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	Terhitung
1023	5.1.02.03.005.00055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	Terhitung
1024	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Terhitung
1025	5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	Terhitung
1026	5.1.02.05.001.00004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Terhitung
1027	5.1.02.05.001.00006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	Terhitung
1028	5.1.02.05.001.00011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Terhitung
1029	5.1.02.05.001.00012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	Terhitung
1030	5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	Terhitung
1031	5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	Terhitung
1032	5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	Terhitung
1033	5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	Terhitung
1034	5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	Terhitung
1035	5.1.02.89.003.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	Terhitung
1036	5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Terhitung
1037	5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Terhitung
1038	5.1.04.04.001.00001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Terhitung
1039	5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Terhitung
1040	5.1.05.05.001.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Terhitung
1041	5.1.05.05.001.00003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Terhitung
1042	5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Terhitung
1043	5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Terhitung
1044	5.1.05.05.002.00003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Terhitung
1045	5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Terhitung
1046	5.1.05.05.003.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Terhitung
1047	5.1.05.05.003.00003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Terhitung
1048	5.1.05.05.004.00001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	Terhitung
1049	5.1.05.05.004.00002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	Terhitung
1050	5.1.05.05.004.00003	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	Terhitung
1051	5.1.05.05.005.00001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terhitung
1052	5.1.05.06.001.00001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	Terhitung
1053	5.1.05.06.002.00001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Terhitung
1054	5.1.05.06.003.00001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	Terhitung
1055	5.1.05.06.004.00001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	Terhitung
1056	5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	Terhitung
1057	5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	Terhitung
1058	5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	Terhitung
1059	5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Terhitung
1060	5.1.06.01.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	Terhitung
1061	5.1.06.02.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	Terhitung
1062	5.1.06.02.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Terhitung
1063	5.1.06.03.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Terhitung
1064	5.1.06.03.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Terhitung
1065	5.1.06.04.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Terhitung
1066	5.1.06.04.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Terhitung
1067	5.2.01.01.003.00007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	Terhitung
1068	5.2.01.01.003.00008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	Terhitung
1069	5.2.01.01.003.00009	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	Terhitung
1070	5.2.01.01.003.00010	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan	Terhitung
1071	5.2.01.01.003.00017	Belanja Modal Tanah Kampung	Terhitung
1072	5.2.01.99.099.09999	Belanja Modal Tanah BLUD	Terhitung
1073	5.2.02.01.001.00001	Belanja Modal Tractor	Terhitung
1074	5.2.02.01.001.00002	Belanja Modal Grader	Terhitung
1075	5.2.02.01.001.00003	Belanja Modal Excavator	Terhitung
1076	5.2.02.01.001.00004	Belanja Modal Pile Driver	Terhitung
1077	5.2.02.01.001.00005	Belanja Modal Hauler	Terhitung
1078	5.2.02.01.001.00006	Belanja Modal Asphalt Equipment	Terhitung
1079	5.2.02.01.001.00007	Belanja Modal Compacting Equipment	Terhitung
1080	5.2.02.01.001.00008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	Terhitung
1081	5.2.02.01.001.00009	Belanja Modal Loader	Terhitung
1082	5.2.02.01.001.00010	Belanja Modal Alat Pengangkat	Terhitung
1083	5.2.02.01.001.00011	Belanja Modal Mesin Proses	Terhitung
1084	5.2.02.01.001.00012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	Terhitung
1085	5.2.02.01.002.00001	Belanja Modal Dredger	Terhitung
1086	5.2.02.01.002.00002	Belanja Modal Floating Excavator	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
1087	5.2.02.01.002.00003	Belanja Modal Amphibi Dredger	Terhitung
1088	5.2.02.01.002.00004	Belanja Modal Kapal Tarik	Terhitung
1089	5.2.02.01.002.00005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	Terhitung
1090	5.2.02.01.002.00006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	Terhitung
1091	5.2.02.01.003.00001	Belanja Modal Alat Penarik	Terhitung
1092	5.2.02.01.003.00002	Belanja Modal Feeder	Terhitung
1093	5.2.02.01.003.00003	Belanja Modal Compressor	Terhitung
1094	5.2.02.01.003.00004	Belanja Modal Electric Generating Set	Terhitung
1095	5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	Terhitung
1096	5.2.02.01.003.00006	Belanja Modal Mesin Bor	Terhitung
1097	5.2.02.01.003.00007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	Terhitung
1098	5.2.02.01.003.00008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	Terhitung
1099	5.2.02.01.003.00009	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	Terhitung
1100	5.2.02.01.003.00010	Belanja Modal Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	Terhitung
1101	5.2.02.01.003.00011	Belanja Modal Mesin Tattoo	Terhitung
1102	5.2.02.01.003.00012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	Terhitung
1103	5.2.02.01.003.00013	Belanja Modal Peralatan Selam	Terhitung
1104	5.2.02.01.003.00014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	Terhitung
1105	5.2.02.01.003.00015	Belanja Modal Peralatan Intelijen	Terhitung
1106	5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Terhitung
1107	5.2.02.02.001.00002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Terhitung
1108	5.2.02.02.001.00003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Terhitung
1109	5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Terhitung
1110	5.2.02.02.001.00005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Terhitung
1111	5.2.02.02.001.00006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	Terhitung
1112	5.2.02.02.001.00007	Belanja Modal Kendaraan Tempur	Terhitung
1113	5.2.02.02.001.00008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel	Terhitung
1114	5.2.02.02.002.00001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Terhitung
1115	5.2.02.02.002.00002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Terhitung
1116	5.2.02.02.002.00003	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Terhitung
1117	5.2.02.02.002.00004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	Terhitung
1118	5.2.02.02.003.00001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	Terhitung
1119	5.2.02.02.003.00002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Terhitung
1120	5.2.02.02.003.00003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Terhitung
1121	5.2.02.02.003.00004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	Terhitung
1122	5.2.02.02.003.00005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Terhitung
1123	5.2.02.02.004.00001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	Terhitung
1124	5.2.02.02.004.00002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	Terhitung
1125	5.2.02.02.004.00003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Terhitung
1126	5.2.02.02.004.00004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	Terhitung
1127	5.2.02.02.005.00001	Belanja Modal Kapal Terbang	Terhitung
1128	5.2.02.02.005.00002	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	Terhitung
1129	5.2.02.03.001.00001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	Terhitung
1130	5.2.02.03.001.00002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	Terhitung
1131	5.2.02.03.001.00003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	Terhitung
1132	5.2.02.03.001.00003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	Terhitung
1133	5.2.02.03.001.00004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	Terhitung
1134	5.2.02.03.001.00004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	Terhitung
1135	5.2.02.03.001.00005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	Terhitung
1136	5.2.02.03.001.00006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	Terhitung
1137	5.2.02.03.001.00007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	Terhitung
1138	5.2.02.03.001.00008	Belanja Modal Peralatan Las	Terhitung
1139	5.2.02.03.001.00009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	Terhitung
1140	5.2.02.03.001.00010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Terhitung
1141	5.2.02.03.002.00001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Terhitung
1142	5.2.02.03.002.00004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	Terhitung
1143	5.2.02.03.002.00005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	Terhitung
1144	5.2.02.03.002.00006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	Terhitung
1145	5.2.02.03.002.00007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	Terhitung
1146	5.2.02.03.002.00008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	Terhitung
1147	5.2.02.03.002.00010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	Terhitung
1148	5.2.02.03.002.00011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	Terhitung
1149	5.2.02.03.002.00012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	Terhitung
1150	5.2.02.03.002.00013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	Terhitung
1151	5.2.02.03.003.00012	Belanja Modal Takaran Kering	Terhitung
1152	5.2.02.03.003.00013	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan	Terhitung
1153	5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Terhitung
1154	5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Terhitung
1155	5.2.02.04.001.00003	Belanja Modal Alat Panen	Terhitung
1156	5.2.02.04.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	Terhitung
1157	5.2.02.04.001.00006	Belanja Modal Alat Processing	Terhitung
1158	5.2.02.04.001.00007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	Terhitung
1159	5.2.02.04.001.00008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	Terhitung
1160	5.2.02.04.001.00009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	Terhitung
1161	5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	Terhitung
1162	5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Terhitung
1163	5.2.02.07.001.00002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	Terhitung
1164	5.2.02.07.001.00003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Terhitung
1165	5.2.02.07.001.00004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	Terhitung
1166	5.2.02.07.001.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Terhitung
1167	5.2.02.07.001.00006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	Terhitung
1168	5.2.02.07.001.00007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	Terhitung
1169	5.2.02.07.001.00008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Terhitung
1170	5.2.02.07.001.00009	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Terhitung
1171	5.2.02.07.001.00010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	Terhitung
1172	5.2.02.07.001.00011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	Terhitung
1173	5.2.02.07.001.00012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Terhitung
1174	5.2.02.07.001.00013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Terhitung
1175	5.2.02.07.001.00014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
1176	5.2.02.07.001.00015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Terhitung
1177	5.2.02.07.001.00016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	Terhitung
1178	5.2.02.07.001.00017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	Terhitung
1179	5.2.02.07.001.00018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	Terhitung
1180	5.2.02.07.001.00019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	Terhitung
1181	5.2.02.07.001.00020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Terhitung
1182	5.2.02.07.001.00021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	Terhitung
1183	5.2.02.07.001.00022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	Terhitung
1184	5.2.02.07.001.00023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Terhitung
1185	5.2.02.07.001.00024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	Terhitung
1186	5.2.02.07.001.00025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	Terhitung
1187	5.2.02.07.001.00026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	Terhitung
1188	5.2.02.07.001.00027	Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine	Terhitung
1189	5.2.02.07.001.00028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	Terhitung
1190	5.2.02.07.001.00029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Terhitung
1191	5.2.02.08.001.00006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Terhitung
1192	5.2.02.08.001.00007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	Terhitung
1193	5.2.02.08.001.00008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	Terhitung
1194	5.2.02.08.001.00009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam	Terhitung
1195	5.2.02.08.001.00010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	Terhitung
1196	5.2.02.08.001.00011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	Terhitung
1197	5.2.02.08.001.00041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	Terhitung
1198	5.2.02.08.001.00041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	Terhitung
1199	5.2.02.08.003.00001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	Terhitung
1200	5.2.02.08.003.00002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	Terhitung
1201	5.2.02.08.003.00003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	Terhitung
1202	5.2.02.08.003.00004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	Terhitung
1203	5.2.02.08.003.00005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	Terhitung
1204	5.2.02.08.003.00006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	Terhitung
1205	5.2.02.08.003.00007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	Terhitung
1206	5.2.02.08.003.00008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama	Terhitung
1207	5.2.02.08.003.00009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	Terhitung
1208	5.2.02.08.003.00010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	Terhitung
1209	5.2.02.08.003.00011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga	Terhitung
1210	5.2.02.08.003.00012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN	Terhitung
1211	5.2.02.08.003.00013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungtu)	Terhitung
1212	5.2.02.08.003.00014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	Terhitung
1213	5.2.02.08.003.00015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	Terhitung
1214	5.2.02.08.003.00016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	Terhitung
1215	5.2.02.11.002.00001	Belanja Modal Mekanik	Terhitung
1216	5.2.02.13.001.00001	Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak	Terhitung
1217	5.2.02.13.001.00002	Belanja Modal Sumur Pemboran	Terhitung
1218	5.2.02.13.003.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak	Terhitung
1219	5.2.02.13.003.00002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	Terhitung
1220	5.2.02.13.003.00003	Belanja Modal Alat Pengolahan Steam	Terhitung
1221	5.2.02.13.003.00004	Belanja Modal Alat Pengolahan Wax	Terhitung
1222	5.2.02.14.001.00002	Belanja Modal Elektrik	Terhitung
1223	5.2.02.14.002.00001	Belanja Modal Perawatan Sumur	Terhitung
1224	5.2.02.14.002.00002	Belanja Modal Tes Unit	Terhitung
1225	5.2.02.16.001.00001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	Terhitung
1226	5.2.02.16.001.00002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	Terhitung
1227	5.2.02.16.001.00003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	Terhitung
1228	5.2.02.17.001.00001	Belanja Modal Liquid-Liquid Contractor Equipment	Terhitung
1229	5.2.02.17.001.00002	Belanja Modal Solid-Solid Mixing Equipment	Terhitung
1230	5.2.02.17.001.00003	Belanja Modal Solid-Solid Screening Equipment	Terhitung
1231	5.2.02.17.001.00004	Belanja Modal Solid-Solid Classifier	Terhitung
1232	5.2.02.17.001.00005	Belanja Modal Solid-Liquid Mixing Equipment	Terhitung
1233	5.2.02.17.001.00006	Belanja Modal Solid Liquid Crystallization Equipment	Terhitung
1234	5.2.02.17.001.00007	Belanja Modal Ion Exchange Absortion Equipment	Terhitung
1235	5.2.02.17.001.00008	Belanja Modal Leaching Equipment	Terhitung
1236	5.2.02.17.001.00009	Belanja Modal Gravity Sedimentation Equipment	Terhitung
1237	5.2.02.17.001.00010	Belanja Modal Solid Liquid Filtering Equipment	Terhitung
1238	5.2.02.17.001.00011	Belanja Modal Centrifuge for Solid Liquid	Terhitung
1239	5.2.02.17.001.00012	Belanja Modal Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	Terhitung
1240	5.2.02.17.001.00013	Belanja Modal Gas-Solid Drying Equipment	Terhitung
1241	5.2.02.17.001.00014	Belanja Modal Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	Terhitung
1242	5.2.02.17.001.00015	Belanja Modal Gas-Solid Separation Equipment	Terhitung
1243	5.2.02.17.001.00016	Belanja Modal Gas-Liquid Distillation Equipment	Terhitung
1244	5.2.02.17.001.00017	Belanja Modal Gas-Liquid Separation Equipment	Terhitung
1245	5.2.02.17.001.00018	Belanja Modal Isotope Separation Equipment	Terhitung
1246	5.2.02.17.001.00019	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid	Terhitung
1247	5.2.02.17.001.00020	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	Terhitung
1248	5.2.02.17.001.00021	Belanja Modal Size Reduction Size Balargement Equipment	Terhitung
1249	5.2.02.17.001.00022	Belanja Modal Heat Generating Equipment	Terhitung
1250	5.2.02.17.001.00023	Belanja Modal Heat Transfer Equipment	Terhitung
1251	5.2.02.17.001.00024	Belanja Modal Mechanical Process	Terhitung
1252	5.2.02.17.001.00025	Belanja Modal Chemical Reaction Equipment	Terhitung
1253	5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	Terhitung
1254	5.2.03.01.001.00002	Belanja Modal Bangunan Gudang	Terhitung
1255	5.2.03.01.001.00004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	Terhitung
1256	5.2.03.01.001.00007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium	Terhitung
1257	5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Terhitung
1258	5.2.03.01.001.00015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Terhitung
1259	5.2.03.01.001.00017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	Terhitung
1260	5.2.03.01.001.00018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Terhitung
1261	5.2.03.01.001.00019	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan	Terhitung
1262	5.2.03.01.001.00020	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	Terhitung
1263	5.2.03.01.001.00021	Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
1264	5.2.03.01.001.00024	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan	Terhitung
1265	5.2.03.01.001.00026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam	Terhitung
1266	5.2.03.01.001.00027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terhitung
1267	5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	Terhitung
1268	5.2.03.01.002.00002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	Terhitung
1269	5.2.03.03.001.00003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	Terhitung
1270	5.2.03.03.001.00004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	Terhitung
1271	5.2.03.03.001.00005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	Terhitung
1272	5.2.03.04.001.00001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Terhitung
1273	5.2.03.04.001.00002	Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	Terhitung
1274	5.2.03.04.001.00003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Terhitung
1275	5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Terhitung
1276	5.2.04.01.001.00002	Belanja Modal Jalan Provinsi	Terhitung
1277	5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Terhitung
1278	5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	Terhitung
1279	5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	Terhitung
1280	5.2.04.01.001.00006	Belanja Modal Jalan Tol	Terhitung
1281	5.2.04.01.001.00007	Belanja Modal Jalan Kereta Api	Terhitung
1282	5.2.04.01.001.00009	Belanja Modal Jalan Khusus	Terhitung
1283	5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	Terhitung
1284	5.2.04.01.002.00001	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional	Terhitung
1285	5.2.04.01.002.00002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	Terhitung
1286	5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	Terhitung
1287	5.2.04.01.002.00005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	Terhitung
1288	5.2.04.01.002.00006	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol	Terhitung
1289	5.2.04.01.002.00007	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api	Terhitung
1290	5.2.04.01.002.00008	Belanja Modal Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Terhitung
1291	5.2.04.01.002.00009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	Terhitung
1292	5.2.04.01.002.00010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	Terhitung
1293	5.2.04.01.002.00011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	Terhitung
1294	5.2.04.01.002.00013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	Terhitung
1295	5.2.04.02.001.00001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	Terhitung
1296	5.2.04.02.001.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	Terhitung
1297	5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	Terhitung
1298	5.2.04.02.001.00004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	Terhitung
1299	5.2.04.02.001.00005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	Terhitung
1300	5.2.04.02.001.00006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	Terhitung
1301	5.2.04.02.001.00007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	Terhitung
1302	5.2.04.02.001.00008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	Terhitung
1303	5.2.04.02.002.00001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut	Terhitung
1304	5.2.04.02.002.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Terhitung
1305	5.2.04.02.002.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	Terhitung
1306	5.2.04.02.002.00004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	Terhitung
1307	5.2.04.02.002.00005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	Terhitung
1308	5.2.04.02.002.00006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Terhitung
1309	5.2.04.02.002.00007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut	Terhitung
1310	5.2.04.02.002.00008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Terhitung
1311	5.2.04.02.003.00001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Terhitung
1312	5.2.04.02.003.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Terhitung
1313	5.2.04.02.003.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Terhitung
1314	5.2.04.02.003.00004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Terhitung
1315	5.2.04.02.003.00005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Terhitung
1316	5.2.04.02.003.00006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Terhitung
1317	5.2.04.02.003.00007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Terhitung
1318	5.2.04.02.003.00008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	Terhitung
1319	5.2.04.02.004.00001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Terhitung
1320	5.2.04.02.004.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	Terhitung
1321	5.2.04.02.004.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	Terhitung
1322	5.2.04.02.004.00004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Terhitung
1323	5.2.04.02.004.00005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Terhitung
1324	5.2.04.02.004.00006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Terhitung
1325	5.2.04.02.004.00007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Terhitung
1326	5.2.04.02.005.00001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Terhitung
1327	5.2.04.02.005.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Terhitung
1328	5.2.04.02.005.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Terhitung
1329	5.2.04.02.005.00004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Terhitung
1330	5.2.04.02.005.00005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Terhitung
1331	5.2.04.02.005.00006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Terhitung
1332	5.2.04.02.005.00007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Terhitung
1333	5.2.04.02.005.00008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	Terhitung
1334	5.2.04.02.006.00001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	Terhitung
1335	5.2.04.02.006.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Terhitung
1336	5.2.04.02.006.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	Terhitung
1337	5.2.04.02.006.00004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Terhitung

NO	KODE REKENING BELANJA	URAIAN AKUN	KETERANGAN
1338	5.2.04.02.006.00005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Terhitung
1339	5.2.04.02.006.00006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Terhitung
1340	5.2.04.02.007.00001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	Terhitung
1341	5.2.04.02.007.00002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor	Terhitung
1342	5.2.04.02.007.00003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Terhitung
1343	5.2.04.02.007.00004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	Terhitung
1344	5.2.04.02.007.00005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	Terhitung
1345	5.2.04.02.007.00006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	Terhitung
1346	5.2.04.03.001.00001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	Terhitung
1347	5.2.04.03.001.00002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Terhitung
1348	5.2.04.03.001.00003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	Terhitung
1349	5.2.04.03.001.00004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	Terhitung
1350	5.2.04.03.001.00005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Terhitung
1351	5.2.04.03.002.00001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	Terhitung
1352	5.2.04.03.002.00002	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri	Terhitung
1353	5.2.04.03.002.00003	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian	Terhitung
1354	5.2.04.03.002.00004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	Terhitung
1355	5.2.04.03.005.00005	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Terhitung
1356	5.2.04.03.005.00006	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Terhitung
1357	5.2.04.03.005.00008	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Terhitung
1358	5.2.04.03.005.00010	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	Terhitung
1359	5.2.04.03.005.00011	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	Terhitung
1360	5.2.04.03.005.00012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	Terhitung
1361	5.2.04.03.006.00002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Terhitung
1362	5.2.04.03.006.00003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Terhitung
1363	5.2.04.03.006.00004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	Terhitung
1364	5.2.04.03.007.00002	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya	Terhitung
1365	5.2.04.03.008.00001	Belanja Modal Instalasi Gardu Gas	Terhitung
1366	5.2.04.03.008.00002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	Terhitung
1367	5.2.04.03.008.00003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas	Terhitung
1368	5.2.04.03.008.00004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	Terhitung
1369	5.2.04.03.009.00001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Terhitung
1370	5.2.04.03.009.00002	Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir	Terhitung
1371	5.2.04.03.009.00003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	Terhitung
1372	5.2.04.03.010.00001	Belanja Modal Instalasi Lain	Terhitung
1373	5.2.04.04.001.00001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	Terhitung
1374	5.2.04.04.001.00002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	Terhitung
1375	5.2.04.04.001.00003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	Terhitung
1376	5.2.04.04.001.00005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	Terhitung
1377	5.2.04.04.002.00001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	Terhitung
1378	5.2.04.04.002.00002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	Terhitung
1379	5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Terhitung
1380	5.2.04.04.003.00002	Belanja Modal Jaringan Telepon di bawah Tanah	Terhitung
1381	5.2.04.04.003.00003	Belanja Modal Jaringan Telepon di dalam Air	Terhitung
1382	5.2.04.04.003.00004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara	Terhitung
1383	5.2.04.04.003.00005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	Terhitung
1384	5.2.04.04.004.00001	Belanja Modal Jaringan Pipa Gas Transmisi	Terhitung
1385	5.2.04.04.004.00002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	Terhitung
1386	5.2.04.04.004.00003	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas	Terhitung
1387	5.2.04.04.004.00004	Belanja Modal Jaringan BBM	Terhitung
1388	5.2.04.04.004.00005	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya	Terhitung
1389	5.2.04.99.099.09999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Terhitung
1390	5.2.05.01.001.00001	Belanja Modal Buku Umum	Terhitung
1391	5.2.05.01.001.00002	Belanja Modal Buku Filsafat	Terhitung
1392	5.2.05.03.002.00001	Belanja Modal Ternak Potong	Terhitung
1393	5.2.05.03.002.00002	Belanja Modal Ternak Perah	Terhitung
1394	5.2.05.03.002.00003	Belanja Modal Ternak Unggas	Terhitung
1395	5.2.05.03.002.00004	Belanja Modal Ternak Lainnya	Terhitung
1396	5.2.05.04.001.00001	Belanja Modal Ikan Budidaya	Terhitung
1397	5.2.05.04.002.00001	Belanja Modal Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)	Terhitung
1398	5.2.05.04.003.00001	Belanja Modal Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan	Terhitung
1399	5.2.05.04.009.00001	Belanja Modal Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	Terhitung
1400	5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	Terhitung
1401	5.2.05.89.001.00002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	Terhitung
1402	5.2.05.89.002.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	Terhitung
1403	5.2.05.89.002.00002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Kinerja	Terhitung
1404	5.2.05.89.003.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	Terhitung
1405	5.2.05.89.003.00002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	Terhitung
1406	5.2.05.99.099.09999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	Terhitung
1407	5.2.06.99.099.09999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	Terhitung
1408	5.4.02.01.002.00002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan	Terhitung
1409	5.4.02.01.002.00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan	Terhitung
1410	5.4.02.01.002.00007	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial	Terhitung
1411	5.4.02.02.002.00002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan	Terhitung
1412	5.4.02.02.002.00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan	Terhitung
1413	5.4.02.02.002.00007	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial	Terhitung
1414	5.4.02.03.002.00002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan	Terhitung
1415	5.4.02.03.002.00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan	Terhitung
1416	5.4.02.03.002.00007	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial	Terhitung
1417	5.4.02.04.002.00002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan	Terhitung
1418	5.4.02.04.002.00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan	Terhitung
1419	5.4.02.04.002.00007	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial	Terhitung
1420	5.4.02.05.002.00006	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan	Terhitung
1421	5.4.02.05.002.00007	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan	Terhitung
1422	5.4.02.05.002.00011	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial	Terhitung
1423	5.4.02.05.002.00038	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan	Terhitung
1424	5.4.02.05.002.00039	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan	Terhitung
1425	5.4.02.05.002.00043	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial	Terhitung